



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BARITO KUALA



2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *“Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024”* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan analisis komprehensif terhadap dinamika kependudukan, mencakup pertumbuhan, persebaran, struktur usia, serta aspek-aspek sosial - ekonomi yang terkait. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan, akademisi praktisi, serta masyarakat luas dalam memahami perubahan demografi yang terjadi, sekaligus sebagai dasar untuk merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan.



Perkembangan kependudukan merupakan faktor strategis yang berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap tren dan tantangan kependudukan menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya. Oleh sebab itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan pada edisi berikutnya.

kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Marabahan, 19 Mei 2025
Kepala Dinas,



Akhmad Wahyuni, S.Sos, M.IP
NIP. 19650501 198602 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
4. Sistematika Penulisan	2
5. Konsep dan Definisi	3
 BAB II GAMBARAN UMUM	 5
1. Letak Geografis	5
2. Kondisi Demografi Daerah	7
3. Kondisi Topografi	8
 BAB III SUMBER DATA	 9
 BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	 10
A. KUANTITAS	10
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk Tahun 2024	10
a) Jumlah dan proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin	10
b) Kepadatan Penduduk	12
c) Laju Pertumbuhan Penduduk	14
2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	16
a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .	16
1) Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	16
2) Piramida Penduduk	17
3) Rasio Ketergantungan	17
b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin	19
1) Angka Perkawinan Kasar	20

2) Angka Perkawinan Umum	21
3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	22
4) Angka Perceraian Kasar	22
5) Angka Perceraian Umum	24
c) Keluarga	25
1) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	25
2) Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)	26
3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	26
4) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	28
5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	29
6) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	30
7) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan	31
d) Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	32
1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	32
2) Jumlah Penduduk Menurut Agama	34
3) Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Disabilitas	35
e) Kelahiran	36
1) Jumlah Kelahiran	36
2) Angka Kelahiran kasar	37
f) Kematian	38
1) Jumlah kematian	38
2) Angka Kematian Kasar	39
B. KUALITAS PENDUDUK	40
1. KESEHATAN	40
a) Kelahiran	40
1) Angka Kelahiran Umum	40
2) Rasio Ibu dan Anak	42
b) Kematian	42
1) Kematian Bayi dan Balita	43
2) Kematian Ibu	44
2. PENDIDIKAN	45
a) Angka Melek Huruf	45

b) Angka Partisipasi Kasar	45
c) Angka Partisipasi Murni	47
d) Angka Putus Sekolah	48
3. EKONOMI	48
a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja	48
1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	48
b) Angka Partisipasi Angkatan Kerja	50
c) Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan	51
4. SOSIAL	52
a) Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas	52
C. MOBILITAS	53
1. Migrasi Masuk	53
2. Migrasi Keluar	54
3. Migrasi Neto	55
BAB V DOKUMEN KEPENDUDUKAN	58
A. Kepemilikan Kartu Keluarga	58
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	59
C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60
D. Identitas Kependudukan Digital	62
E. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	63
1. Akta Kelahiran	63
2. Akta Kematian	66
3. Akta Perkawinan	66
4. Akta Perceraian	67
BAB VI KESIMPULAN	69

DAFTAR TABEL

Hal

BAB II GAMBARAN UMUM

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala tahun 2024	6
-----------	--	---

BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala menurut Kecamatan Tahun 2024	11
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk	13
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	14
Tabel 4.4	Rasio Jenis Kelamin	16
Tabel 4.5	Rasio Ketergantungan Penduduk	18
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan	19
Tabel 4.7	Angka Perkawinan Kasar Per kecamatan Tahun 2024	20
Tabel 4.8	Angka Perkawinan Umum	21
Tabel 4.9	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	22
Tabel 4.10	Angka Perceraian Kasar	23
Tabel 4.11	Angka Perceraian Umum	24
Tabel 4.12	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	25
Tabel 4.13	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga (SHDK)	26
Tabel 4.14	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur	27
Tabel 4.15	Distribusi Kepala Keluarga Berdasarkan Kecamatan	28
Tabel 4.16	Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	29
Tabel 4.17	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	30
Tabel 4.18	Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	31
Tabel 4.19	Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan yang di tamatkan	33
Tabel 4.20	Jumlah Penduduk Menurut Agama	34
Tabel 4.21	Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Disabilitas	35
Tabel 4.22	Jumlah Kelahiran	36
Tabel 4.23	Angka Kelahiran Kasar	37
Tabel 4.24	Jumlah Kematian	38
Tabel 4.25	Angka Kematian Kasar	39
Tabel 4.26	Angka Kelahiran Umum	41
Tabel 4.27	Rasio Ibu dan Anak	42
Tabel 4.28	Jumlah Kematian Bayi dan Balita	43

Tabel 4.29	Jumlah Kematian Ibu	44
Tabel 4.30	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)	46
Tabel 4.31	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM)	47
Tabel 4.32	Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	49
Tabel 4.33	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 4.34	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	51
Tabel 4.35	Migrasi Penduduk Masuk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	54
Tabel 4.36	Migrasi Penduduk Keluar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	55
Tabel 4.37	Migrasi Penduduk Netto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	56

BAB V DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Tabel 5.1	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	59
Tabel 5.2	Jumlah Kepemilikan KTP-el	60
Tabel 5.3	Jumlah Kartu Identittas Anak	61
Tabel 5.4	Jumlah Aktivasi Identittas Kependudukan Digital (IKD)	62
Tabel 5.5	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Seluruh Usia	63
Tabel 5.6	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-5 Tahun	64
Tabel 5.7	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun	65
Tabel 5.8	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	66
Tabel 5.9	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	67
Tabel 5.10	Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian	68

DAFTAR GAMBAR

	Hal
BAB II GAMBARAN UMUM	
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Barito Kuala	6
Gambar 2.2 Diagram Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	7
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	
Gambar 4.1 Gambar Diagram Jumlah Penduduk Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin	11
Gambar 4.2 Gambar Diagram Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan	13
Gambar 4.3 Gambar Diagram Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	15
Gambar 4.4 Gambar Piramida Penduduk di Kabupaten Barito Kuala	17

INOVASI LAYANAN

	Hal
MACAM-MACAM INOVASI LAYANAN DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BARITO KUALA	70
1. TARUMADOKBIT (Daftar di Rumah Dokumen Terbit)	70
2. PAKRS (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)	70
3. PAKODE (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)	70
4. KANDA (Kami Datang Dokumen Tercetak)	70
5. Gambar Inovasi Layanan	71

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan perkembangan Kabupaten Barito Kuala yang tidak lepas dari adanya berbagai fasilitas akomodasi yang tersedia, perkembangan tersebut menjadikan kabupaten Barito Kuala sebagai daya tarik tersendiri bagi para pendatang yang menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai tempat bermukim karena kedekatannya dengan Kota Banjarmasin, selain itu juga merupakan daerah migrasi dan pengimbang Kabupaten.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja menjadi subjek tetapi juga sekaligus menjadi objek pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran ini pembangunan masalah kependudukan diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan mobilitas penduduk.

Sejalan dengan hal tersebut Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan juga mengamanatkan agar pembangunan di bidang Kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi Kependudukan berskala Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan dapat dijadikan sebagai acuan dasar bagi sektor terkait dalam setiap kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya. Untuk itu Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 telah menegaskan bahwa data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan informasi akan data dan indikator kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil - hasil pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan Kependudukan hingga wilayah kecamatan bahkan kelurahan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program - program kependudukan. Semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan saat ini mencakup lima hal pokok bahasan, antara lain:

1. Menyajikan perkembangan profil kependudukan secara kuantitatif sehingga tampak menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung.
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya - upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk.
3. Teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah maupun nasional.
4. Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan, kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya.
5. Mendorong terwujudnya database penduduk dan analisis data base kependudukan sebagai rujukan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil - hasil pembangunan.

3. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 memuat deskripsi data dan analisis implikasi atas data:

1. Kuantitas Penduduk, meliputi Jumlah dan Komposisi serta Persebaran Penduduk menurut Demografi;
2. Kualitas Penduduk meliputi Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial;
3. Mobilitas (Migrasi) Penduduk, meliputi Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk;
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan, meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP-el, KIA, Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Akta Pencatatan Sipil

4. Sistematika Penulisan

Mengingat luasnya cakupan yang di analisis, penyusun membagi dalam enam bab sebagai berikut:

- | | |
|---------|------------------------------------|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Gambaran umum daerah |
| Bab III | : Sumber Data |
| Bab IV | : Perkembangan Kependudukan |
| Bab V | : Kepemilikan Dokumen Kependudukan |
| Bab VI | : Kesimpulan |

5. Konsep dan Definisi

- a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- d. Data Kependudukan adalah data perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- f. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- g. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat tanda kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap
- h. Profil Perkembangan Kependudukan adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
- i. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian yang layak.
- j. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal
- k. Mobilitas Penduduk adalah gerak ruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah Tingkat II
- l. Rasio Jenis Kelamin (sex Rasio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 penduduk perempuan.
- m. Kelahiran (Fertilitas) adalah kemampuan reproduksi nyata dari penduduk perempuan biasanya dinyatakan dalam ribuan penduduk perempuan usia produktif (15-49) dalam kependudukan dikenal 2 ukuran yang sering dipakai :

- ASFR (Aged Spesific Fertility Rate) adalah fertilitas menurut golongan umur ibu.
 - TFR (Total Fertility Rate) adalah fertilitas total (gabungan), tanpa memandang golongan ibu.
- n. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun).

BAB II

GAMBARAN UMUM

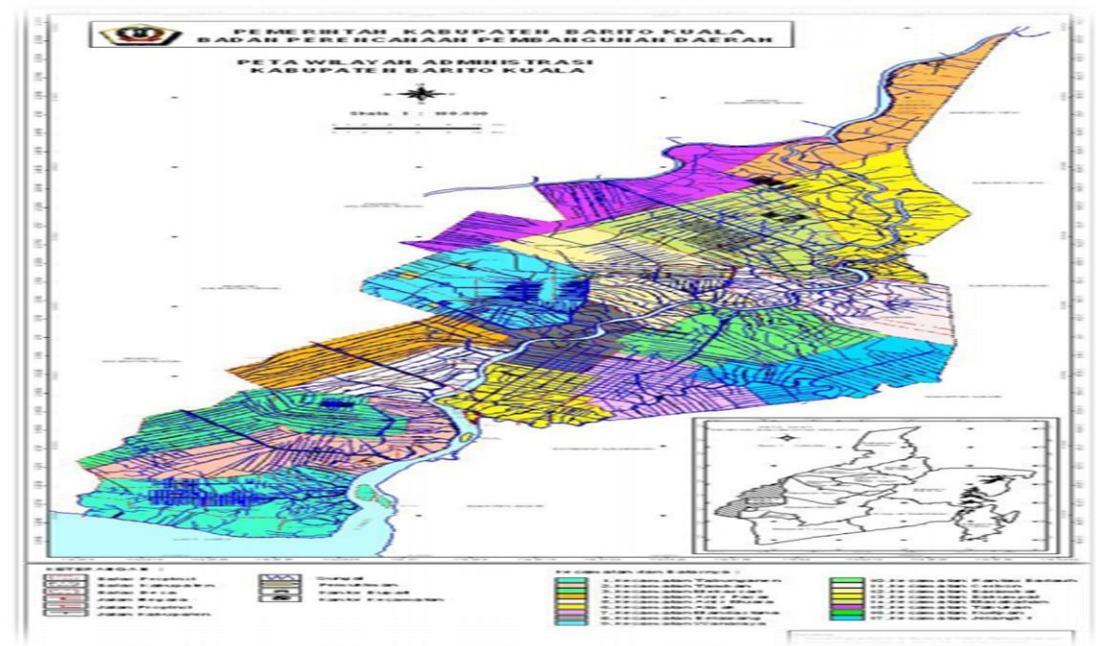
A. Letak Geografis Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala yang ber-ibu kota Marabahan terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
- Sebelah Selatan = Laut Jawa
- Sebelah Timur = Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin
- Sebelah Barat = Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan letak astronomis berada pada 2°29'50" - 3°30'18" Lintang Selatan dan 114°20'50" - 114°50'18" Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang datar dengan kelerengan 0% - 2%, dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Tanah Alluvial berwarna coklat hijau, tanah ini terdiri dari endapat Alluvium yang bahan induknya terutama termasuk dari pasir dan lumpur yang dibawa dan diendapkan oleh arus sungai dari pedalaman, tanah terdapat di sepanjang Sungai Barito dan tepi Sungai Kapuas, berupa tanggul-tanggul dan juga pada beberapa medeander sungai. Tanah Alluvial ini menutupi areal seluas 191.390 Ha, atau lebih kurang 64% dari luas wilayah Kabupaten Barito Kuala dan merupakan daerah terbaik bagi pertanian pasang surut.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Barito Kuala

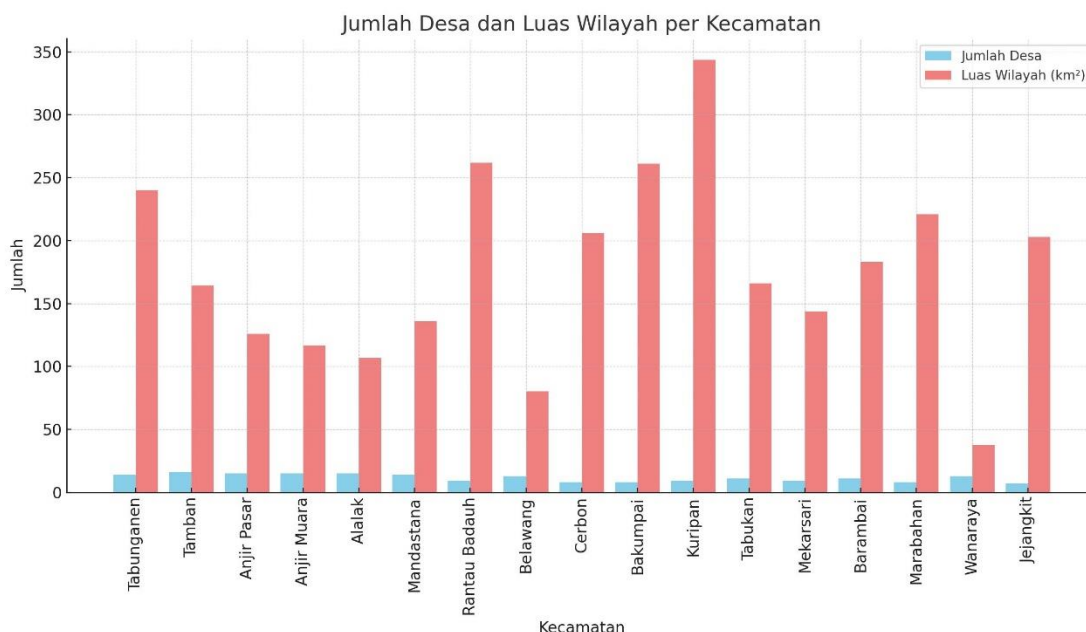


Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

KECAMATAN		JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH	IBU KOTA KECAMATAN
1	Tabunganen	-	14	240	Tabunganen kecil
2	Tamban	-	16	164,3	Purwosari I
3	Anjir Pasar	-	15	126	Anjir Pasar Kota I
4	Anjir Muara	-	15	116,75	Anjir Muara Kota
5	Alalak	3	15	106,85	Handil Bakti
6	Mandastana	-	14	136	Puntik Luar
7	Rantau Badauh	-	9	261,81	Sei Gampa
8	Belawang	-	13	80,25	Belawang
9	Cerbon	-	8	206	Bantuil
10	Bakumpai	1	8	261	Lepasan
11	Kuripan	-	9	343,5	Rimbun tulang
12	Tabukan	-	11	166	Teluk Tamba
13	Mekarsari	-	9	143,5	Tamban Raya
14	Barambai	-	11	183	Barambai
15	Marabahan	2	8	221	Marabahan kota
16	Wanaraya	-	13	37,5	Kolam kiri
17	Jejangkit	-	7	203	Jejangkit pasar
Jumlah		6	195	2.996,46	

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambarl 2.2 Diagram Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024



1. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 hingga tahun 2024 rata-rata mengalami kenaikan dengan pertumbuhan antara 0,58 persen hingga 1,63 persen. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 318.044 jiwa, lalu tahun 2021 menurun 0,29 persen menjadi 317.118 jiwa, tahun 2022 meningkat sebesar 0,82 persen menjadi 319.708 jiwa. Tahun 2023 meningkat sebesar 1,50 persen menjadi 324.502 jiwa kemudian pada tahun 2024 menjadi 329.799 jiwa atau meningkat sebesar 1,63 persen.

Distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar tahun 2024 adalah Kecamatan Alalak sebanyak 65.537. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 6.166 jiwa. Kalau lebih jauh dilihat keadaan dinamika kependudukan di Kabupaten Barito Kuala, terutama kalau ditinjau dari aspek persebaran dan kepadatan penduduk per kecamatan akan tergambar secara kuantitas. Kecamatan Alalak merupakan kecamatan yang berpenduduk banyak yaitu 19,87 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan kecamatan dengan tingkat persebaran penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuripan yaitu 1,87 persen, padahal kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini terkait dengan letak dan kondisi geografis Kecamatan Kuripan itu sendiri dan belum terpenuhinya akses transportasi secara optimal. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat kepadatannya dapat diketahui bahwa Kecamatan Alalak dan Wanaraya merupakan kecamatan yang padat penduduknya di Kabupaten Barito Kuala yaitu masing-masing sebesar 613,36 dan 407,76 jiwa/km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil masih dipegang

oleh Kecamatan Kuripan yaitu sekitar 17,95 jiwa/km². Hal ini wajar, mengingat wilayah paling luas dengan penduduk paling sedikit di Kabupaten Barito Kuala. Selebihnya, penduduk tersebar merata hampir di seluruh Kabupaten Barito Kuala.

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan).

BAB III

SUMBER DATA

Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan memberikan pedoman yang komprehensif dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan di suatu daerah. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai sumber data yang digunakan. Data yang akurat dan relevan merupakan kunci dalam menghasilkan profil kependudukan yang valid dan dapat diandalkan. Data Registrasi menjadi sumber data utama dalam penyusunan profil kependudukan. Data ini diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data registrasi meliputi berbagai informasi penting seperti jumlah penduduk, kelahiran, kematian, perpindahan, serta karakteristik penduduk lainnya. Melalui data registrasi, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang dinamika kependudukan suatu daerah. Data dari lintas sektor juga menjadi sumber data yang penting dalam penyusunan profil kependudukan. Data ini diperoleh dari berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan pembangunan. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor, kita dapat menganalisis hubungan antara perkembangan kependudukan dengan berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang sesuai. Data yang telah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi yang mudah dipahami. Penyajian data yang efektif akan membantu pembaca memahami secara menyeluruh tentang perkembangan kependudukan di suatu daerah. Buku profil perkembangan kependudukan yang disusun berdasarkan pedoman Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 telah memberikan kerangka yang jelas mengenai sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia, kita dapat menghasilkan profil kependudukan yang akurat, relevan, dan up-to-date.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu wilayah. Secara umum, kuantitas penduduk mengacu pada jumlah individu yang mendiami suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat terjadi secara alami, melalui kelahiran dan kematian, maupun melalui perpindahan penduduk (migrasi). Peningkatan kuantitas penduduk memiliki dua sisi yang perlu dicermati. Di satu sisi, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitas sumber daya manusianya baik. Namun di sisi lain, lonjakan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang tepat dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran, serta tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan kuantitas penduduk menjadi aspek strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyebaran informasi kependudukan yang merata menjadi langkah penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kuantitas penduduk dan kualitas hidup.

Berikut ini adalah rincian mengenai kuantitas penduduk Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024, dimana data yang didapat bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Kemendagri semester II Tahun 2024

1. Jumlah Dan Persebaran Penduduk Tahun 2024

a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

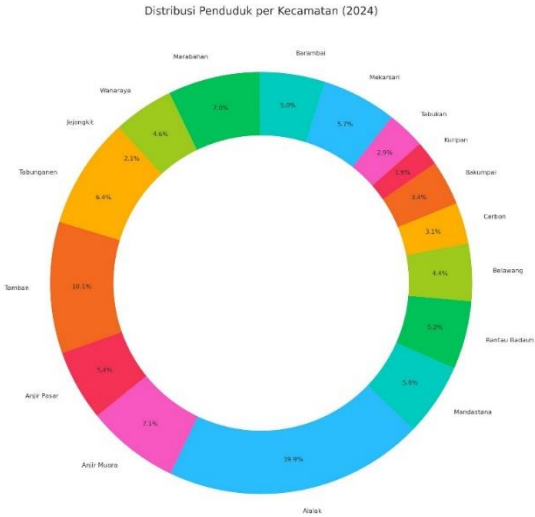
Persebaran penduduk Kabupaten Barito Kuala dengan luas wilayah 2.996,46 Km² tidaklah merata dari segi Kuantitas memang cukup mengesankan bila dilihat dari perkembangan dari tahun ketahun, menurut data DKB (Data konsolidasi bersih) kemendagri Kabupaten Barito Kuala pada Akhir Tahun 2024 berjumlah terdiri dari laki-laki 167.086 jiwa dan perempuan 162.713 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK
1	TABUNGANEN	10.760	10.439	21.199
2	TAMBAN	16.894	16.308	33.202
3	ANJIR PASAR	9.034	8.933	17.967
4	ANJIR MUARA	11.881	11.556	23.437
5	ALALAK	33.116	32.421	65.537
6	MANDASTANA	9.306	9.102	18.408
7	RANTAU BADAUH	8.668	8.590	17.258
8	BELAWANG	7.388	7.125	14.513
9	CERBON	5.249	5.116	10.365
10	BAKUMPAI	5.869	5.431	11.300
11	KURIPAN	3.170	2.996	6.166
12	TABUKAN	4.873	4.772	9.645
13	MEKARSARI	9.592	9.279	18.871
14	BARAMBAI	8.348	8.195	16.543
15	MARABAHAN	11.582	11.612	23.194
16	WANARAYA	7.815	7.476	15.291
17	JEJANGKIT	3.541	3.362	6.903
JUMLAH		167.086	162.713	329.799

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Gambar 4.1 Diagram Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas, total jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala yang tersebar di 17 kecamatan mencapai 329.799 jiwa, dengan rincian 167.086 jiwa laki-laki dan 162.713 jiwa perempuan. Data ini mencerminkan distribusi penduduk yang cukup merata, meskipun terdapat perbedaan signifikan antar wilayah kecamatan.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Alalak dengan total 65.537 jiwa, disusul oleh Kecamatan Tamban (33.202 jiwa) dan Kecamatan Marabahan (23.194 jiwa). Ketiga kecamatan ini menjadi pusat konsentrasi penduduk yang tinggi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan layanan publik yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kuripan dengan 6.166 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Jejangkit (6.903 jiwa) dan Kecamatan Cerbon (10.365 jiwa). Jumlah penduduk yang relatif rendah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis, keterbatasan sarana prasarana, serta peluang ekonomi yang masih terbatas.

Distribusi kuantitas penduduk ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam hal pemerataan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi yang adaptif dan inklusif agar pertumbuhan penduduk dapat dikelola secara seimbang, tidak hanya berfokus pada daerah padat penduduk, tetapi juga memperhatikan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit namun memiliki potensi pengembangan.

b) Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah. Kepadatan penduduk berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. Kepadatan penduduk umum, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempatinya. Rumusnya : $\text{Kepadatan aritmatik} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Luas wilayah}} \times 1 \text{ km}^2$

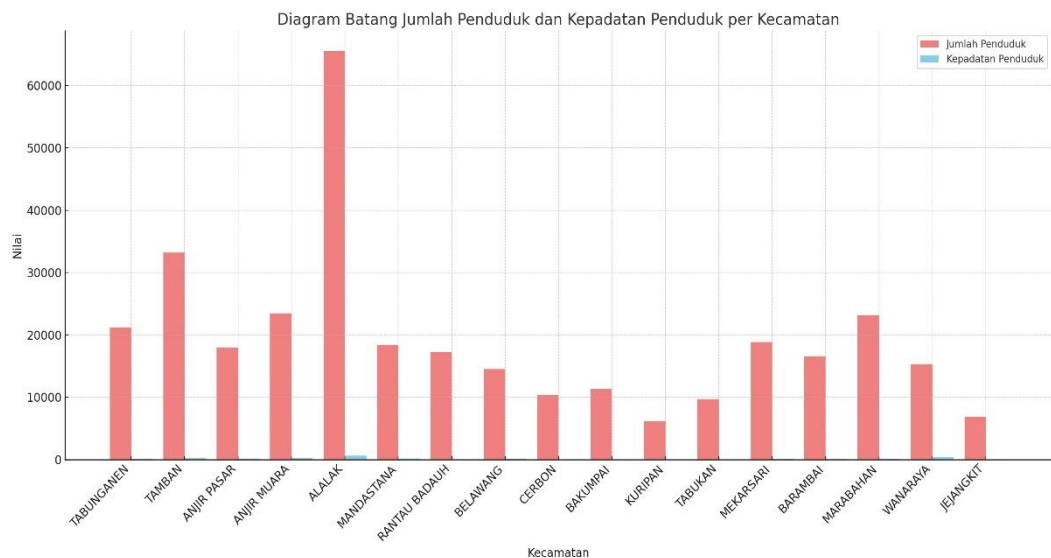
Jika pada banyak kabupaten lain jumlah penduduk perempuan mendominasi jumlah penduduk laki – laki, maka di Kabupaten Barito Kuala lebih di dominasi oleh penduduk laki laki. Dilihat dari distribusinya penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan tidak merata ini disebabkan terjadinya perbedaan pengembangan daerah sehingga mengalami demografis-geologis yang harus dihadapi dalam pembangunan terutama pemerataan pembangunan yang akan dijadikan tolak ukur, tingginya permasalahan sosial seperti banyaknya pengangguran dan lapangan pekerjaan yang sangat sulit di cari, sehingga penduduk Barito Kuala banyak yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu pekerjaan di luar Kabupaten Barito Kuala lebih banyak memberikan kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan

Tabel 4.2 Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
1	TABUNGANEN	21.199	240,00	88,33
2	TAMBAN	33.202	164,30	202,08
3	ANJIR PASAR	17.967	126,00	142,60
4	ANJIR MUARA	23.437	116,75	200,75
5	ALALAK	65.537	106,85	613,36
6	MANDASTANA	18.408	136,00	135,35
7	RANTAU BADAUH	17.258	261,81	65,92
8	BELAWANG	14.513	80,25	180,85
9	CERBON	10.365	206,00	50,32
10	BAKUMPAI	11.300	261,00	43,30
11	KURIPAN	6.166	343,50	17,95
12	TABUKAN	9.645	166,00	58,10
13	MEKARSARI	18.871	143,50	131,51
14	BARAMBAI	16.543	183,00	90,40
15	MARABAHAN	23.194	221,00	104,95
16	WANARAYA	15.291	37,50	407,76
17	JEJANGKIT	6903	203,00	34,00
JUMLAH		329.799	2.996,46	110,06

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Gambar 4.2 Diagram Rasio Kepadatan Penduduk per Kecamatan



Berdasarkan tabel diatas, jumlah total penduduk Kabupaten Barito Kuala mencapai 329.799 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 2.996,46 km². Dengan demikian, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Barito Kuala adalah sekitar 110,06 jiwa per km². Namun, kepadatan penduduk tidak tersebar merata di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah menunjukkan konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kecamatan Alalak tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 65.537 jiwa dan juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 613,36 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Alalak merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang menarik arus migrasi dan pertumbuhan penduduk alami yang tinggi. Di sisi lain, Kecamatan Kuripan mencatat kepadatan penduduk terendah, yakni hanya 17,95 jiwa per km², meskipun memiliki wilayah terluas (343,50 km²). Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Jejangkit dan Bakumpai yang memiliki kepadatan rendah dengan luas wilayah cukup besar. Rendahnya kepadatan ini bisa mencerminkan keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, atau aktivitas ekonomi yang masih minim. Kecamatan Wanaraya menjadi contoh menarik karena meskipun luas wilayahnya tergolong kecil (37,50 km²), kepadatan penduduknya sangat tinggi yaitu 407,76 jiwa per km², menunjukkan tingkat urbanisasi dan konsentrasi penduduk yang signifikan di daerah tersebut.

c) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan – kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

N O	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2023	PENDUDUK TAHUN 2024	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	TABUNGANEN	20.987	21.199	1,01
2	TAMBAN	32.925	33.202	0,84
3	ANJIR PASAR	17.754	17.967	1,20
4	ANJIR MUARA	23.301	23.437	0,58
5	ALALAK	63.000	65.537	4,03
6	MANDASTANA	18.172	18.408	1,30
7	RANTAU BADAUH	17.142	17.258	0,68
8	BELAWANG	14.406	14.513	0,74
9	CERBON	10.242	10.365	1,20
10	BAKUMPAI	11.120	11.300	1,62
11	KURIPAN	6.129	6.166	0,60
12	TABUKAN	9.529	9.645	1,22
13	MEKARSARI	18.633	18.871	1,28
14	BARAMBAI	16.405	16.543	0,84
15	MARABAHAN	22.832	23.194	1,59
16	WANARAYA	15.033	15.291	1,72
17	JEJANGKIT	6.892	6.903	0,16
JUMLAH		324.502	329.799	1,63

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

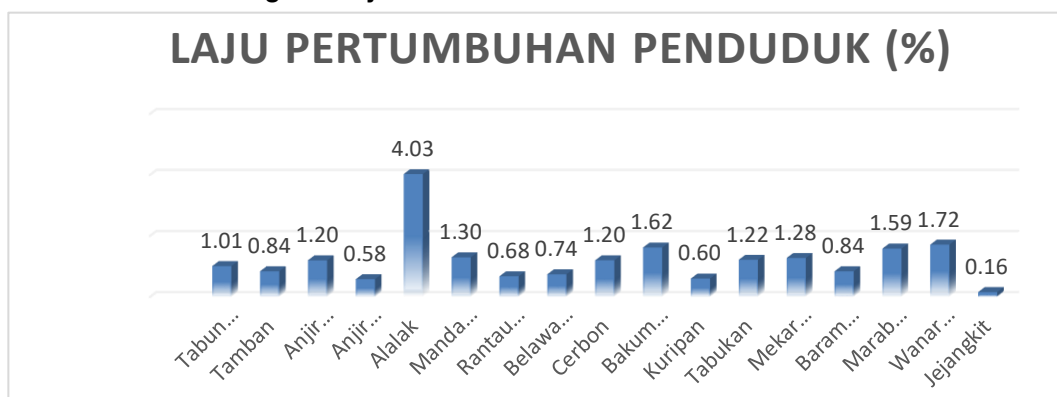
Jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari 324.502 jiwa pada tahun 2023 menjadi 329.799 jiwa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63% secara keseluruhan dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan jumlah penduduk ini tersebar di seluruh kecamatan, dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Kecamatan Alalak mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 4,03%, menandakan tingginya dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut, yang kemungkinan didorong oleh urbanisasi, migrasi masuk, serta tingkat kelahiran yang relatif tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang cepat, Kecamatan Alalak berpotensi mengalami tekanan terhadap layanan publik dan infrastruktur jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, Kecamatan Jejangkit memiliki laju pertumbuhan paling rendah, yaitu hanya 0,16%. Ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat stabil atau bahkan mendekati stagnan. Laju pertumbuhan rendah juga terlihat di Kecamatan Anjir Muara (0,58%) dan Kuripan (0,60%), yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, aksesibilitas yang terbatas, atau rendahnya arus migrasi ke wilayah tersebut.

Sebagian besar kecamatan mencatat laju pertumbuhan antara 0,6% hingga 1,3%, mencerminkan tren pertumbuhan yang moderat. Beberapa di antaranya seperti Mandastana (1,30%), Mekarsari (1,28%), dan Tabukan (1,22%) menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dan terkendali.

Pertumbuhan penduduk ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pertumbuhan yang sehat dapat mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan tenaga kerja dan permintaan pasar. Namun di sisi lain, laju pertumbuhan yang tinggi, terutama di wilayah padat seperti Alalak dan Wanaraya, menuntut perencanaan tata ruang dan pelayanan publik yang adaptif.

Dengan adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar kecamatan, penting bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menyusun strategi pembangunan yang seimbang, baik untuk wilayah yang tumbuh pesat maupun wilayah yang relatif stagnan, guna menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 4.3 Diagram Laju Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan



2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a) Jumlah dan Proporsi penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

1) Rasio Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Rasio Jenis Kelamin

NO	Struktur Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio jenis Kelamin
1	0-4	11.057	10.340	21.397	106,93
2	5-9	13.736	13.090	26.826	104,94
3	10-14	14.816	14.028	28.844	105,62
4	15-19	13.161	12.669	25.830	103,88
5	20-24	14.702	13.400	28.102	109,72
6	25-29	11.961	10.890	22.851	109,83
7	30-34	13.037	12.225	25.262	106,64
8	35-39	12.669	12.724	25.393	99,57
9	40-44	13.342	13.293	26.635	100,37
10	45-49	12.646	12.876	25.522	98,21
11	50-54	11.103	11.220	22.323	98,96
12	55-59	9.134	9.048	18.182	100,95
13	60-64	6.589	6.399	12.988	102,97
14	65-69	4.162	4.416	8.578	94,25
15	70-74	2.624	2.542	5.166	103,23
16	> 75	2.347	3.553	5.900	66,06
Jumlah		167.086	162.713	329.799	102,69

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 adalah 329.799 jiwa, yang terdiri dari 167.086 laki-laki dan 162.713 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,69. Artinya, secara keseluruhan terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, menunjukkan keseimbangan yang relatif normal dalam distribusi jenis kelamin.

Jika ditinjau berdasarkan struktur umur, kelompok usia terbanyak berada pada rentang 10–14 tahun dengan jumlah 28.844 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 20–24 tahun (28.102 jiwa) dan 5–9 tahun (26.826 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif awal, yang berpotensi menjadi modal pembangunan daerah di masa mendatang.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (>75 tahun) hanya mencakup 5.900 jiwa, dan merupakan kelompok dengan rasio jenis kelamin paling rendah, yaitu 66,06, menunjukkan bahwa jumlah perempuan lanjut usia jauh lebih banyak dibanding laki-laki, sejalan dengan tren umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup lebih tinggi.

Kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur penduduk, yang mencerminkan potensi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi. Namun, kehadiran kelompok usia muda (0–14 tahun) yang cukup besar juga menjadi indikator beban

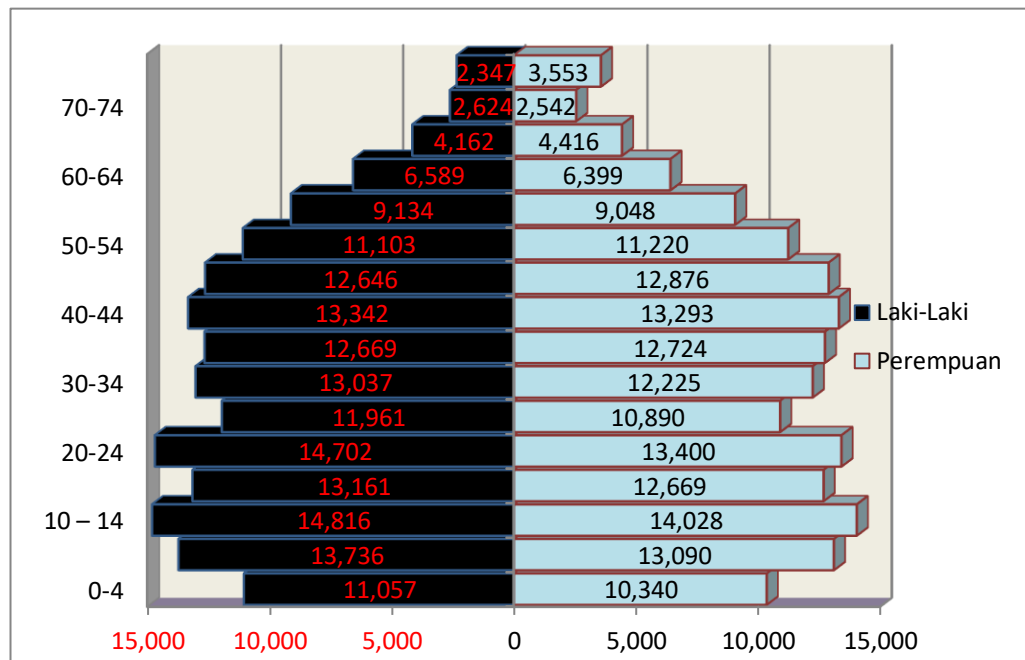
ketergantungan yang perlu dikelola melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan struktur penduduk yang relatif muda dan produktif, dengan distribusi jenis kelamin yang seimbang. Ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan jangka panjang, terutama dalam sektor ketenagakerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok usia yang dominan.

2) Piramida Penduduk

Struktur Umur penduduk menurut jenis Kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menggambarkan jumlah penduduk dan badan piramida kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki – laki dan perempuan. Kabupaten Barito Kuala menunjukkan struktur Penduduk konstruktif dengan struktur Penduduk usia Produktif lebih besar dari pada kelompok usia muda dan tua

Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024



Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

3) Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau dependency Ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Penduduk Muda berusia 0 – 14 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara penduduk berusia 65 tahun dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 4.5

Rasio Ketergantungan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	USIA MUDA	USIA PRODUKTIF	USIA TUA	RASIO KETERGANTUNGAN MUDA	RASIO KETERGANTUNGAN TUA	RASIO KETERGANTUNGAN TOTAL
1	TABUNGANEN	4.947	14.935	1.317	33,12	8,82	41,94
2	TAMBAN	7.193	23.776	2.233	30,25	9,39	39,65
3	ANJIR PASAR	3.983	12.703	1.281	31,35	10,08	41,44
4	ANJIR MUARA	5.559	16.630	1.248	33,43	7,5	40,93
5	ALALAK	16.253	46.586	2.698	34,89	5,79	40,68
6	MANDASTANA	4.510	12.762	1.136	35,34	8,9	44,24
7	RANTAU BADAUH	3.976	12.153	1.129	32,72	9,29	42,01
8	BELAWANG	3.226	10.253	1.034	31,46	10,08	41,55
9	CERBON	2.344	7.332	689	31,97	9,4	41,37
10	BAKUMPAI	2.601	8.139	560	31,96	6,88	38,84
11	KURIPAN	1.377	4.492	297	30,65	6,61	37,27
12	TABUKAN	2.424	6.678	543	36,3	8,13	44,43
13	MEKARSARI	4.319	13.244	1.308	32,61	9,88	42,49
14	BARAMBAI	3.898	11.621	1.024	33,54	8,81	42,35
15	MARABAHAN	5.263	16.489	1.442	31,92	8,75	40,66
16	WANARAYA	3.560	10.418	1.313	34,17	12,6	46,77
17	JEJANGKIT	1.634	4.877	392	33,5	8,04	41,54
	JUMLAH	77.067	233.088	19.644	33,06	8,43	41,49

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa total jumlah penduduk usia muda mencapai 77.067 jiwa, usia produktif 233.088 jiwa, dan usia tua 19.644 jiwa. Dari keseluruhan data tersebut, didapatkan rasio ketergantungan muda sebesar 33,06, rasio ketergantungan tua sebesar 8,43, dan rasio ketergantungan total sebesar 41,49.

Rasio ketergantungan mencerminkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk mendukung penduduk yang tergolong tidak produktif

(usia muda dan tua). Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar pula beban yang dipikul oleh kelompok usia produktif.

Dari 17 kecamatan, Kecamatan Wanaraya memiliki rasio ketergantungan total tertinggi yaitu 46,77, yang dipicu oleh rasio ketergantungan tua yang cukup tinggi (12,6) dibanding kecamatan lain. Hal ini menunjukkan tingginya proporsi penduduk lanjut usia di wilayah tersebut yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

Sebaliknya, Kecamatan Kuripan mencatatkan rasio ketergantungan total paling rendah, yaitu 37,27, menunjukkan beban ekonomi pada kelompok usia produktif di wilayah ini relatif lebih ringan dibanding kecamatan lainnya.

Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di semua kategori usia, mencerminkan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Meskipun begitu, rasio ketergantungan total di Alalak masih tergolong moderat (40,68), berkat tingginya proporsi penduduk usia produktif.

Secara umum, sebagian besar kecamatan menunjukkan rasio ketergantungan total antara 38 hingga 44, yang menandakan bahwa setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 38 hingga 44 orang dari kelompok usia muda dan tua. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sosial ekonomi dan penyediaan layanan publik.

Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengelola program-program pemberdayaan penduduk usia produktif sekaligus mempersiapkan sistem dukungan yang memadai untuk kelompok usia muda (sekolah, pelatihan) dan usia tua (layanan kesehatan, jaminan sosial) demi menjaga keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh kecamatan.

b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK	PERSENTASE (%)
BELUM KAWIN	79.688	63.319	143.007	43,36
KAWIN	81.543	81.246	162.789	49,36
CERAI HIDUP	2.720	3.930	6.650	2,02
CERAI MATI	3.135	14.218	17.353	5,26
JUMLAH	167.086	162.713	329.799	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Status perkawinan dikategorikan menjadi empat kategori, antara lain yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Kabupaten Barito Kuala, status kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 49,36% atau 162.789 orang dimana komposisi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yang kedua yaitu kategori belum kawin sebesar 43,36% dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sedangkan status cerai mati persentasenya sebesar

5,26% dan status perkawinan yang terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 2,02% atau sebanyak 6.650 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada status perkawinan cerai hidup yang lebih sedikit dibanding cerai mati dapat membuktikan bahwa jumlah hubungan keluarga yang harmonis di Kabupaten Barito Kuala cukup tinggi dikarenakan penduduk yang berstatus cerai hidup paling sedikit.

1) Angka Perkawinan Kasar

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada “ waktu tertentu” berguna bagi pemerintah kabupaten Barito Kuala dalam menentukan program kependudukan. Kelahiran dan Upaya -upaya peningkatan kualitas keluarga di lingkup kabupaten barito kuala. Angka perkawinan kasar menunjukkan jumlah perkawinan per -1000 penduduk terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu, tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Angka perkawinan kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya peristiwa perkawinan per 1.000 penduduk dalam satu tahun wilayah tertentu.

Rumus perhitungan Angka Perkawinan Kasar :

$$\text{Rumus Angka Perkawinan Kasar} = \frac{\text{Jumlah perkawinan dalam 1 tahun}}{\text{jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1000$$

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2024, angka perkawinan kasar penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah 9,28 sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 4.7 Angka Perkawinan Kasar Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
1	TABUNGANEN	123	21.109	5,83
2	TAMBAN	285	33.058	8,62
3	ANJIR PASAR	171	17.819	9,60
4	ANJIR MUARA	202	23.341	8,65
5	ALALAK	633	64.145	9,87
6	MANDASTANA	156	18.234	8,56
7	RANTAU BADAUH	130	17.171	7,57
8	BELAWANG	176	14.438	12,19
9	CERBON	84	10.307	8,15
10	BAKUMPAI	118	11.194	10,54
11	KURIPAN	58	6.149	9,43
12	TABUKAN	84	9.596	8,75
13	MEKARSARI	157	18.757	8,37
14	BARAMBAI	187	16.470	11,35
15	MARABAHAN	278	22.969	12,10
16	WANARAYA	150	15.075	9,95
17	JEJANGKIT	41	6.904	5,94
	BARITO KUALA	3.033	326.736	9,28

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada pelaksanaannya pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Regulasi yang baru, terdapat perubahan pada batas minimal kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga batas umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipersamakan 19 tahun. Batas usia tersebut, dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, mengurangi resiko perceraian dan mengurangi laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Angka perkawinan kasar menunjukkan penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun di suatu periode tertentu. Angka Perkawinan Kasar dilihat dari setiap kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Belawang merupakan kecamatan yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 12,19 dibandingkan dengan kecamatan lain.

2) Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perkawinan umum sedikit lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena factor pembagiannya adalah penduduk dalam “usia kawin”. Angka Perkawinan umum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angka Perkawinan Umum} = \frac{\text{Jumlah Perkawinan Dalam Satu Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk pertengahan tahun pada usia 15 tahun keatas}} \times 1000$$

Berikut data Angka Perkawinan Umum di berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024:

Tabel 4.8 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN	PENDUDUK USIA >15 TAHUN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
1	TABUNGANEN	123	15.982	7,70
2	TAMBAN	285	25.504	11,17
3	ANJIR PASAR	171	13.693	12,49
4	ANJIR MUARA	202	17.501	11,54
5	ALALAK	633	47.610	13,30
6	MANDASTANA	156	13.552	11,51
7	RANTAU BADAUH	130	13.069	9,95
8	BELAWANG	176	11.063	15,91
9	CERBON	84	7.856	10,69
10	BAKUMPAI	118	8.510	13,87
11	KURIPAN	58	4.711	12,31
12	TABUKAN	84	7.089	11,85
13	MEKARSARI	157	14.262	11,01
14	BARAMBAI	187	12.367	15,12
15	MARABAHAN	278	17.498	15,89
16	WANARAYA	150	11.380	13,18
17	JEJANGKIT	41	5.179	7,92
BARITO KUALA		3.033	246.826	12,29

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Angka perkawinan umum merupakan proporsi penduduk berstatus kawin terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu. Seperti angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin, namun pembaginya adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dimana usia tersebut lebih berisiko untuk kawin. Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun tidak diikutsertakan karena pada usia tersebut umumnya tidak berisiko kawin.

3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Tabel 4.9 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK			PENDUDUK BERSTATUS KAWIN			ANGKA PERKAWINAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
15-19	13.161	12.669	25.830	32	302	334	12,93
20-24	14.702	13.400	28.102	1.985	4.826	6.811	242,37
25-29	11.961	10.890	22.851	5.723	8.252	13.975	611,57
30-34	13.037	12.225	25.262	9.091	10.891	19.982	790,99
35-39	12.669	12.724	25.393	10.247	11.582	21.829	859,65
40-44	13.342	13.293	26.635	11.582	11.916	23.498	882,22
45-49	12.646	12.876	25.522	11.296	11.031	22.327	874,81
50-54	11.103	11.220	22.323	10.061	8.927	18.988	850,60
55-59	9.134	9.048	18.182	8.186	6.325	14.511	798,10
60-64	6.589	6.399	12.988	5.812	3.773	9.585	737,99
65-69	4.162	4.416	8.578	3.594	2.020	5.614	654,46
70-74	2.624	2.542	5.166	2.175	835	3.010	582,66
>75	2.347	3.553	5.900	1.758	566	2.324	393,90
JUMLAH	127.477	125.255	252.732	81.542	81.246	162.788	644,11

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, sebanyak 162.788 orang telah berstatus kawin, terdiri dari 81.542 laki-laki dan 81.246 perempuan. Angka perkawinan secara keseluruhan tercatat sebesar 644,11, yang menggambarkan jumlah penduduk kawin per 1.000 penduduk. Usia Remaja (15–19 tahun) Pada kelompok usia ini, jumlah penduduk mencapai 25.830 jiwa. Namun, hanya 334 orang (1,29%) yang telah menikah, dengan angka perkawinan terendah yaitu 12,93. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan dini sudah relatif jarang, terutama pada laki-laki (hanya 32 orang menikah), meskipun masih ada kecenderungan lebih tinggi pada perempuan (302 orang menikah).pada Usia Muda Produktif (20–34 tahun) Ini menunjukkan bahwa rentang usia 25–34 merupakan fase puncak awal dalam pernikahan, dengan perempuan sedikit lebih dominan dalam angka pernikahan dibanding laki-laki.

4) Angka Perceraian Kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perceraian mempunyai implikasi demografi sekaligus implikasi sosiologis.

Implikasi demografi adalah mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap Perempuan dan anak – anak mereka.

Cara menghitung angka perceraian kasar dihitung dengan membagi kasus perceraian yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun disuatu wilayah tertentu.

$$C = \frac{c}{p} \times 1000$$

C = Jumlah Perceraian yang terjadi selama satu tahun
p = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama
c = Angka Perceraian Kasar

Tabel 4.10 Angka Perceraian Kasar Menurut Kecamatan tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2024	PERCERAIAN KASAR
1	TABUNGANEN	14	21.109	0,66
2	TAMBAN	32	33.058	0,97
3	ANJIR PASAR	42	17.819	2,36
4	ANJIR MUARA	90	23.341	3,86
5	ALALAK	111	64.145	1,73
6	MANDASTANA	29	18.234	1,59
7	RANTAU BADAUH	33	17.171	1,92
8	BELAWANG	18	14.438	1,25
9	CERBON	23	10.307	2,23
10	BAKUMPAI	17	11.194	1,52
11	KURIPAN	14	6.149	2,28
12	TABUKAN	19	9.596	1,98
13	MEKARSARI	29	18.757	1,55
14	BARAMBAI	34	16.470	2,06
15	MARABAHAN	48	22.969	2,09
16	WANARAYA	13	15.075	0,86
17	JEJANGKIT	8	6.904	1,16
BARITO KUALA		574	326.736	1,76

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas Pada tahun 2024, jumlah perceraian di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 574 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang mencapai 326.736 jiwa, maka diperoleh angka perceraian kasar sebesar 1,76 per 1.000 penduduk.

Angka perceraian kasar merupakan indikator yang menggambarkan jumlah perceraian setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Data ini penting untuk mengukur kestabilan sosial serta menjadi salah satu indikator kesejahteraan keluarga dan masyarakat di tingkat daerah.

Bila dilihat lebih rinci per kecamatan, Kecamatan Anjir Muara mencatat angka perceraian kasar tertinggi, yaitu 3,86 per 1.000 penduduk, diikuti oleh Kecamatan Anjir Pasar (2,36) dan Kuripan (2,28). Angka-angka ini menunjukkan bahwa dalam wilayah-wilayah tersebut, proporsi perceraian terhadap jumlah penduduk relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya.

5) Angka Perceraian Umum

Proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Angka perceraian umum dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Pembaginya adalah penduduk 15 tahun keatas dimana penduduk bersangkutan lebih berisiko cerai. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak berisiko cerai. Angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih baik karena memperhitungkan umur dan factor resiko.

Cara menghitung untuk memperoleh angka perceraian yang lebih spesifik bisa dihitung dengan angka perceraian umum, yang sudah memperhitungkan penduduk yang terkena resiko perceraian yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas atau disebut penduduk yang berumur divorceable. Rumus umum yang digunakan adalah

$$C15+ = \frac{C}{P15+} \times 1000$$

C15+ = angka Perceraian umum

P 15 = Penduduk 15 tahun keatas pada pertengahan tahun

C = Perceraian yang terjadi dalam satu tahun

Tabel 4.11 Angka Perceraian Umum Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS TENGAH TAHUN 2024	ANGKA PERCERAIAN UMUM
1	TABUNGANEN	14	16.252	0,86
2	TAMBAN	32	26.009	1,23
3	ANJIR PASAR	42	13.984	3,00
4	ANJIR MUARA	90	17.878	5,03
5	ALALAK	111	49.284	2,25
6	MANDASTANA	29	13.898	2,09
7	RANTAU BADAUH	33	13.282	2,48
8	BELAWANG	18	11.287	1,59
9	CERBON	23	8.021	2,87
10	BAKUMPAI	17	8.699	1,95
11	KURIPAN	14	4.789	2,92
12	TABUKAN	19	7.221	2,63
13	MEKARSARI	29	14.552	1,99
14	BARAMBAI	34	12.645	2,69
15	MARABAHAN	48	17.931	2,68
16	WANARAYA	13	11.731	1,11
17	JEJANGKIT	8	5.269	1,52
BARITO KUALA		574	252.732	2,27

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, jumlah kasus perceraian di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 574 kasus, dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 252.732 jiwa. Ini menghasilkan angka perceraian umum sebesar 2,27 per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata angka perceraian di Barito Kuala adalah 2,27 per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka perceraian tertinggi dicapai di Anjir Muara (5,03), sementara terendah di Tabunganen (0,86). Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tekanan ekonomi, urbanisasi, serta akses terhadap lembaga peradilan kemungkinan besar memengaruhi tingkat perceraian antar kecamatan.

c) Keluarga

Keluarga menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 1988 adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Atau definisi keluarga dapat lebih disederhanakan menjadi sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

Indikator untuk menggambarkan kondisi keluarga, antara lain jumlah keluarga dan rata – rata jumlah anggota keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status Kawin, karakteristik kepala keluarga berdasarkan Pendidikan, dan karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan

1) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Kesejahteraan dan kondisi umum sebuah keluarga bisa dilihat dan tergambar dan dilihat daripada jumlah anggota keluarga. Hal ini didasarkan atas asumsi semakinkecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, begitupun yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di kabupaten barito kuala. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 4.12 Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Tahun 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA	RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA
1	TABUNGANEN	21.199	7.534	2,81
2	TAMBAN	33.202	11.645	2,85
3	ANJIR PASAR	17.967	6.415	2,80
4	ANJIR MUARA	23.437	8.014	2,92
5	ALALAK	65.537	21.335	3,07
6	MANDASTANA	18.408	6.227	2,96
7	RANTAU BADAUH	17.258	5.917	2,92
8	BELAWANG	14.513	5.121	2,83
9	CERBON	10.365	3.626	2,86
10	BAKUMPAI	11.300	3.982	2,84
11	KURIPAN	6.166	2.203	2,80
12	TABUKAN	9.645	3.353	2,88
13	MEKARSARI	18.871	6.481	2,91
14	BARAMBAI	16.543	5.574	2,97
15	MARABAHAN	23.194	7.935	2,92
16	WANARAYA	15.291	5.363	2,85
17	JEJANGKIT	6.903	2.340	2,95
	BARITO KUALA	329.799	113.065	2,92

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk dari adanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri satu sama lain yang dinamakan perkawinan. Keluarga dipimpin oleh Kepala Keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya tujuan keluarga yakni kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari sudut pandang banyaknya anggota keluarga. Nilai rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Barito Kuala sebesar 2,92 artinya pada setiap keluarga rata-rata terdiri dari 2 - 3 orang.

2) Status Hubungan Dengan Keluarga (SHDK)

Anak, istri, menantu, cucu bahkan pembantu menjadi objek penting adanya “status hubungan dengan kepala keluarga”. Jumlah penduduk berdasarkan status hubungan dalam keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola asuh anak dalam suatu keluarga. Secara data yang sudah terkumpul “Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga” dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga tahun 2024

NO	STATUS HUBUNGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPALA KELUARGA	90.347	22.718	113.065
2	SUAMI	14	0	14
3	ISTERI	0	76.343	76343
4	ANAK	74.498	60.716	135.214
5	MENANTU	3	9	12
6	CUCU	728	536	1264
7	ORANG TUA	46	649	695
8	MERTUA	50	350	400
9	FAMILI LAIN	1.273	1.160	2.433
10	PEMBANTU	0	1	1
11	LAINNYA	127	231	358
BARITO KUALA		167.086	162.713	329.799

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

3) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Adapun Kepala Keluarga dilihat dari pada aspek kelompok umur dengan rentang umur 5 tahun sebagai berikut:

Tabel 4.14 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH KEPALA KELUARGA	%
1	00-04	0	0,00
2	05-09	0	0,00
3	10-14	0	0,00
4	15-19	223	0,20
5	20-24	3.125	2,76
6	25-29	7.140	6,31
7	30-34	11.037	9,76
8	35-39	12.358	10,93
9	40-44	13.941	12,33
10	45-49	14.329	12,67
11	50-54	13.429	11,88
12	55-59	12.059	10,67
13	60-64	9.403	8,32
14	65-69	6.662	5,89
15	70-74	4.343	3,84
16	>75	5.006	4,43
JUMLAH		113.065	100,00

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data distribusi jumlah kepala keluarga menurut kelompok umur, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berada pada usia produktif, khususnya rentang usia 25 hingga 54 tahun. Kelompok umur 45-49 tahun mencatat jumlah tertinggi dengan 14.329 kepala keluarga (12,67%), disusul oleh kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 13.941 (12,33%) dan 50-54 tahun sebanyak 13.429 (11,88%). Hal ini mencerminkan dominasi usia matang dan mapan dalam struktur keluarga.

Secara keseluruhan, kelompok usia 25-54 tahun mencakup lebih dari setengah dari total kepala keluarga, yaitu sekitar 63,63%. Sementara itu, kelompok usia lanjut (>60 tahun) masih mencakup sekitar 22,48%, yang menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesejahteraan dan layanan sosial bagi lansia yang masih memegang peran sebagai kepala keluarga.

Jumlah kepala keluarga yang sangat sedikit pada kelompok umur 15-24 tahun (hanya 2,96%) menunjukkan bahwa peran kepala keluarga umumnya belum diemban oleh usia muda, yang kemungkinan besar masih berada pada tahap pendidikan atau awal karier.

Distribusi ini mencerminkan pola umum struktur keluarga di mana tanggung jawab sebagai kepala keluarga lebih dominan dipegang oleh individu usia produktif hingga menjelang masa pensiun.

4) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 4.15 Jumlah kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	5.992	1.542	7.534
2	TAMBAN	9.235	2.410	11.645
3	ANJIR PASAR	4.910	1.505	6.415
4	ANJIR MUARA	6.306	1.708	8.014
5	ALALAK	17.246	4.089	21.335
6	MANDASTANA	5.048	1.179	6.227
7	RANTAU BADAUH	4.749	1.168	5.917
8	BELAWANG	4.018	1.103	5.121
9	CERBON	2.893	733	3.626
10	BAKUMPAI	3.196	786	3.982
11	KURIPAN	1.802	401	2.203
12	TABUKAN	2.672	681	3.353
13	MEKARSARI	5.102	1.379	6.481
14	BARAMBAI	4.527	1.047	5.574
15	MARABAHAN	6.316	1.619	7.935
16	WANARAYA	4.463	900	5.363
17	JEJANGKIT	1.872	468	2.340
BARITO KUALA		90.347	22.718	113.065

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan total jumlah penduduk sebanyak 113.065 jiwa, terdiri dari 90.347 laki-laki dan 22.718 perempuan. Dari 17 kecamatan yang ada, Kecamatan Alalak menempati urutan tertinggi dengan jumlah penduduk mencapai 21.335 jiwa, disusul oleh Kecamatan Tamban (11.645 jiwa) dan Anjir Muara (8.014 jiwa). Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kuripan dengan total 2.203 jiwa.

Secara umum, setiap kecamatan menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat konsisten di seluruh wilayah, dengan perbandingan yang cukup signifikan di beberapa kecamatan seperti Alalak dan Tamban.

Dominasi jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan besar seperti Alalak dan Tamban menunjukkan bahwa wilayah tersebut mungkin menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemukiman padat, atau memiliki akses infrastruktur yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kecil cenderung merupakan wilayah pedesaan atau kurang berkembang secara populasi.

Distribusi ini memberikan gambaran penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, serta pengambilan kebijakan daerah yang berorientasi pada kebutuhan penduduk di masing-masing wilayah kecamatan.

5) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status perkawinan di Kabupaten Barito Kuala dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh seorang yang belum menikah maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Banyaknya angka perceraian baik termasuk kedalam kategori cerai hidup ataupun cerai mati menjadi faktor utama mengapa jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tergolong cukup banyak di Kabupaten Barito Kuala.

Data lengkap Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin terlampir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.16 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM KAWIN	3.519	1.522	5.041
2	KAWIN	81.318	4.374	85.692
3	CERAI HIDUP	2.471	3.614	6.085
4	CERAI MATI	3.039	13.208	16.247
JUMLAH		90.347	22.718	113.065

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data kepala keluarga menurut status perkawinan, tercatat total 113.065 kepala keluarga, yang terdiri dari 90.347 laki-laki dan 22.718 perempuan. Mayoritas kepala keluarga berada dalam status kawin, dengan jumlah sebesar 85.692 jiwa (sekitar 75,8% dari total), didominasi oleh laki-laki sebanyak 81.318 jiwa. Hal ini mencerminkan bahwa peran kepala keluarga masih banyak diemban oleh laki-laki dalam konteks rumah tangga yang utuh atau masih menikah.

Status belum kawin hanya mencakup 5.041 kepala keluarga (4,46%), dan menunjukkan bahwa ada sebagian individu lajang yang menjadi kepala keluarga, baik karena tanggung jawab keluarga besar maupun alasan lain.

Sementara itu, kelompok cerai hidup berjumlah 6.085 jiwa (5,38%), dengan jumlah perempuan lebih tinggi (3.614) dibanding laki-laki (2.471), menunjukkan kemungkinan bahwa perempuan lebih banyak mengambil peran kepala keluarga setelah perceraian.

Yang cukup signifikan adalah kelompok cerai mati sebanyak 16.247 kepala keluarga (14,37%), di mana perempuan mendominasi dengan jumlah 13.208, yang menandakan banyak janda yang menjadi kepala keluarga setelah ditinggal pasangan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika peran kepala keluarga di Barito Kuala yang masih sangat didominasi oleh laki-laki (79,87%), namun menunjukkan peran signifikan perempuan terutama dalam situasi pasca-perkawinan seperti cerai atau ditinggal mati.

6) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai seorang kepala keluarga diharapkan semakintinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Tingginya Pendidikan seseorang pun akan menjadi indikator suatu daerah memiliki Indeks Pembangunan yang Baik. Tentunya peningkatan kualitas Pendidikan pun harus dibarengi dengan terbukannya lapangan pekerjaan yang luas, sehingga nantinya tidak ada permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Data Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan terlampir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	1.315	1.452	2.767
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	3.937	2.592	6.529
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	37.326	12.274	49.600
4	SLTP/SEDERAJAT	18.700	3.016	21.716
5	SLTA/SEDERAJAT	22.292	2.422	24.714
6	DIPLOMA I/II	332	74	406
7	DIPLOMA III/SARJANA MUDA	929	131	1.060
8	DIPLOMA IV/STRATA I	5.125	720	5.845
9	STRATA II	380	36	416
10	STRATA III	11	1	12
JUMLAH		90.347	22.718	113.065

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Distribusi kepala keluarga menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa mayoritas masih memiliki tingkat pendidikan dasar. Dari total 113.065 kepala keluarga, sebanyak 49.600 jiwa (43,86%) tercatat sebagai tamat SD atau sederajat, menjadikannya kelompok pendidikan terbanyak. Kelompok berikutnya adalah lulusan SLTA/sederajat sebanyak 24.714 jiwa (21,86%) dan SLTP/sederajat sebanyak 21.716 jiwa (19,21%).

Jika dikategorikan, sekitar 84,93% kepala keluarga memiliki tingkat pendidikan dari tamat SD hingga SLTA, yang menunjukkan bahwa pendidikan dasar hingga menengah adalah yang paling umum di wilayah ini.

Sementara itu, kepala keluarga yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma hingga Strata III) berjumlah relatif kecil, yakni hanya sekitar 7.739 jiwa (6,84%), dengan rincian terbanyak pada jenjang Strata I (5.845 jiwa). Hal ini mengindikasikan bahwa akses atau kesempatan pendidikan tinggi masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat.

Dari sisi gender, jumlah kepala keluarga laki-laki jauh lebih banyak pada semua jenjang pendidikan dibandingkan perempuan, mencerminkan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga secara keseluruhan.

Menariknya, terdapat juga 2.767 kepala keluarga (2,45%) yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap peningkatan pendidikan dasar dan literasi di beberapa segmen masyarakat.

Secara keseluruhan, data ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.

7) Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status Pekerjaan

Tabel 4.18 Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan status Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	913	814	1.727
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	9.290	9.294
3	PELAJAR/MAHASISWA	567	304	871
4	PENSIUNAN	966	198	1.164
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.572	380	2.952
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	182	0	182
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	397	5	402
8	PERDAGANGAN	257	64	321
9	PETANI/PEKEBUN	36.380	8.673	45.053
10	PETERNAK	18	2	20
11	NELAYAN/PERIKANAN	401	15	416
12	INDUSTRI	7	1	8
13	KONSTRUKSI	16	0	16
14	TRANSPORTASI	117	2	119
15	KARYAWAN SWASTA	12.058	582	12.640
16	KARYAWAN BUMN	130	3	133
17	KARYAWAN BUMD	68	0	68
18	KARYAWAN HONORER	956	138	1.094
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.677	41	2.718
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	939	181	1.120
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	10	0	10
22	BURUH PETERNAKAN	5	0	5
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	8	8
24	TUKANG CUKUR	13	0	13
25	TUKANG LISTRIK	9	0	9
26	TUKANG BATU	45	0	45
27	TUKANG KAYU	147	0	147
28	TUKANG SOL SEPATU	2	0	2
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	31	0	31
30	TUKANG JAHIT	31	15	46
31	PENATA RIAS	1	3	4
32	PENATA RAMBUT	2	1	3
33	MEKANIK	85	0	85
34	SENIMAN	5	0	5
35	IMAM MASJID	7	0	7
36	PENDETA	8	0	8
37	WARTAWAN	14	0	14
38	USTADZ/MUBALIGH	17	1	18

39	JURU MASAK	1	1	2
40	ANGGOTA BPK	1	0	1
41	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	15	1	16
42	DOSEN	52	6	58
43	GURU	452	106	558
44	PENGACARA	3	2	5
45	NOTARIS	2	0	2
46	ARSITEK	2	0	2
47	KONSULTAN	8	0	8
48	DOKTER	13	1	14
49	BIDAN	0	8	8
50	PERAWAT	62	9	71
51	APOTEKER	3	0	3
52	PELAUT	64	0	64
53	PENELITI	2	0	2
54	SOPIR	214	0	214
55	PIALANG	1	0	1
56	PARANORMAL	1	0	1
57	PEDAGANG	1.319	242	1.561
58	PERANGKAT DESA	298	19	317
59	KEPALA DESA	50	1	51
60	WIRASWASTA	27.706	1.598	29.304
61	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA	10	2	12
62	MANAJER	1	0	1
63	PEKERJAAN LAINNYA	10	1	11
JUMLAH		90.347	22.718	113.065

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, jumlah total kepala keluarga tercatat sebanyak 113.065 jiwa, yang terdiri dari 90.347 laki-laki dan 22.718 perempuan. Data ini menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka tekuni, serta memperlihatkan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai kepala keluarga. Sebagian besar kepala keluarga di wilayah ini bekerja di sektor pertanian, wirausaha, dan swasta. Perempuan sebagai kepala keluarga lebih dominan dalam pekerjaan domestik dan profesi pendukung. Profesi formal dan profesional hadir meski tidak mendominasi, mencerminkan beragam latar belakang ekonomi masyarakat. Tingginya jumlah kepala keluarga yang bekerja sendiri (wirausaha/petani) menunjukkan kemandirian ekonomi berbasis lokal.

d) Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

Penduduk adalah pengklasifikasian penduduk atas dasar barometer dan tujuan tertentu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan yang sangat penting guna menentukan kebijakan kependudukan kabupaten Barito Kuala di masa yang akan datang.

1) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Setiap penduduk berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan diharapkan untuk selalu berkembang serta terus menjadi pembelajar. Pendidikan sangatlah penting untuk suatu daerah

sebagai dasar dari pembangunan daerah tersebut. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih ditambah dengan etos kerja dan keterampilan. Berikut data penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.19
Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan yang di tamatkan Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	29.332	50,57	28.674	49,43	58.006
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	21.262	50,43	20.902	49,57	42.164
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	47.279	48,91	49.377	51,09	96.656
4	SLTP/SEDERAJAT	29.609	50,28	29.282	49,72	58.891
5	SLTA/SEDERAJAT	31.932	56,04	25.051	43,96	56.983
6	DIPLOMA I/II	348	45,55	416	54,45	764
7	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	1.088	42,40	1.478	57,60	2.566
8	DIPLOMA IV/STRATA I	5.826	44,40	7.295	55,60	13.121
9	STRATA-II	397	63,12	232	36,88	629
10	STRATA-III	13	68,42	6	31,58	19

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Barito Kuala menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar. Dari seluruh jenjang pendidikan, lulusan SD/ sederajat menjadi yang terbanyak, yaitu 96.656 jiwa, atau sekitar 25,89% dari total data. Komposisi gender pada kelompok ini cukup berimbang, dengan perempuan sedikit lebih banyak (51,09%) dibanding laki-laki (48,91%).

Kelompok pendidikan terbanyak berikutnya adalah SLTP/ sederajat sebanyak 58.891 jiwa dan tidak/ belum sekolah sebanyak 58.006 jiwa, yang masing-masing menunjukkan masih adanya tantangan dalam akses dan penyelesaian pendidikan dasar, terutama bagi kelompok usia yang lebih tua atau rentan.

Pendidikan menengah atas (SLTA/ sederajat) menempati urutan keempat terbanyak, dengan 56.983 jiwa, di mana laki-laki mendominasi (56,04%). Namun ketika masuk jenjang pendidikan tinggi, komposisi ini mulai berbalik. Lulusan Diploma I/II hingga Strata I didominasi oleh perempuan. Contohnya, lulusan Strata I (S1) mencapai 13.121 jiwa, dengan 55,60% perempuan, dan lulusan Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda sebanyak 2.566 jiwa, juga didominasi perempuan (57,60%).

Pada jenjang Strata II dan III, meskipun jumlahnya masih kecil, tren kembali berpihak kepada laki-laki, terutama di Strata III, di mana dari 19 lulusan, 68,42% adalah laki-laki.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Mayoritas penduduk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD dan SLTP, Masih terdapat jumlah signifikan penduduk yang belum atau tidak bersekolah, Perempuan mulai mendominasi pada jenjang pendidikan tinggi non-strata dan strata satu, Perlu upaya lanjutan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi kelompok yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar.

2) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan informasi jumlah penduduk beserta agama yang diantaranya di Kabupaten Barito Kuala, diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana dan peribadahan serta merencanakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama

Tabel 4.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2024

NO	KECAMATAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONGHUCU	KEPERCAYAAN LAINNYA
1	TABUNGANEN	21.196	3	0	0	0	0	0
2	TAMBAN	33.182	8	7	3	2	0	0
3	ANJIR PASAR	17.957	6	4	0	0	0	0
4	ANJIR MUARA	23.404	11	22	0	0	0	0
5	ALALAK	64.527	703	200	51	56	0	0
6	MANDASTANA	18.345	53	8	0	2	0	0
7	RANTAU BADAUH	17.218	23	17	0	0	0	0
8	BELAWANG	14.486	18	9	0	0	0	0
9	CERBON	10.138	57	170	0	0	0	0
10	BAKUMPAI	11.084	103	113	0	0	0	0
11	KURIPAN	6.066	49	51	0	0	0	0
12	TABUKAN	9.645	0	0	0	0	0	0
13	MEKARSARI	18.870	1	0	0	0	0	0
14	BARAMBAI	15.680	123	4	736	0	0	0
15	MARABAHAN	23.008	92	71	21	2	0	0
16	WANARAYA	14.582	89	4	616	0	0	0
17	JEJANGKIT	6.867	26	10	0	0	0	0
	BARITO KUALA	326.255	1.365	690	1.427	62	0	0

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 didominasi oleh pemeluk agama Islam, dengan jumlah mencapai 326.255 jiwa, yang merupakan sekitar 99% dari total penduduk. Ini mencerminkan karakteristik demografis wilayah yang sangat homogen secara keagamaan, khususnya dalam konteks mayoritas Muslim.

Di luar agama Islam, jumlah penganut agama lain terpantau sangat kecil secara persentase, namun tetap menunjukkan adanya keberagaman. Agama Kristen dan Katolik masing-masing memiliki 1.365 dan 690 jiwa, tersebar di beberapa kecamatan seperti Alalak, Bakumpai, Kuripan, dan Cerbon. Sementara itu, penganut agama Hindu berjumlah 1.427 jiwa, dengan konsentrasi signifikan di Kecamatan Barambai (736 jiwa) dan Wanaraya (616 jiwa), menandakan adanya komunitas Hindu yang relatif stabil di daerah tersebut.

Agama Budha hanya dianut oleh 62 jiwa, dan tidak ditemukan data penganut agama Khonghucu maupun kepercayaan lainnya dalam data tahun ini, menunjukkan tingkat keberagaman kepercayaan yang sangat kecil secara kuantitatif.

Kecamatan Alalak menjadi wilayah dengan keberagaman agama paling tinggi, dengan penduduk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang semuanya tercatat. Hal ini bisa mengindikasikan keberadaan pusat kota atau daerah pemukiman campuran yang lebih terbuka dan beragam secara sosial budaya.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan dominasi Islam sebagai agama mayoritas di Barito Kuala, namun juga penting dicatat adanya minoritas keagamaan yang memerlukan pengakuan dan perlindungan dalam konteks sosial dan kebijakan publik

3) Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Informasi jumlah disabilitas terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 4.21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Perkecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	DISABILITAS FISIK	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL	DISABILITAS NETRA/BUTA	DISABILITAS MENTAL/JIWA	DISABILITAS RUNGU/WICARA	DISABILITAS LAINNYA
1	TABUNGANEN	23	8	20	46	0	1
2	TAMBAN	22	10	23	65	7	9
3	ANJIR PASAR	24	3	4	36	1	2
4	ANJIR MUARA	4	1	5	40	3	4
5	ALALAK	28	5	30	99	10	19
6	MANDASTANA	23	4	8	22	2	8
7	RANTAU BADAUH	1	3	5	26	0	0
8	BELAWANG	3	2	6	15	0	6
9	CERBON	3	5	3	7	2	1
10	BAKUMPAI	2	0	1	5	2	0
11	KURIPAN	0	0	1	2	0	0
12	TABUKAN	2	0	3	1	1	0
13	MEKARSARI	25	5	7	59	2	7
14	BARAMBAI	12	2	8	25	6	8
15	MARABAHAN	25	0	12	33	4	4
16	WANARAYA	3	1	5	13	0	3
17	JEJANGKIT	2	0	4	2	1	0
BARITO KUALA		202	49	145	496	41	72

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tabel 4.21, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 1.005 jiwa yang tersebar di berbagai jenis disabilitas dan 17 kecamatan. Jenis disabilitas dengan jumlah tertinggi adalah disabilitas mental/jiwa, yaitu sebanyak 496 jiwa (49,35%), yang menjadi perhatian khusus karena mencerminkan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa dan dukungan sosial.

Kecamatan Alalak memiliki jumlah penyandang disabilitas tertinggi secara keseluruhan, yaitu dengan total 191 jiwa, termasuk angka tertinggi untuk disabilitas mental (99 jiwa), disabilitas netra (30 jiwa), serta disabilitas lainnya (19 jiwa). Ini menunjukkan bahwa Alalak, sebagai wilayah dengan populasi besar dan heterogen, memerlukan perhatian lebih dalam pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kecamatan lain yang juga memiliki jumlah disabilitas cukup tinggi adalah Mekarsari (105 jiwa) dan Tamban (136 jiwa), sementara kecamatan dengan angka terendah adalah Kuripan, dengan hanya 3 jiwa yang tercatat sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan pemerataan pelayanan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dukungan lintas sektor menjadi penting untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang inklusif dan ramah disabilitas.

e) Kelahiran

1) Jumlah Kelahiran

Tabel 4.22

Jumlah Kematian berdasarkan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN
1	TABUNGANEN	149
2	TAMBAN	216
3	ANJIR PASAR	123
4	ANJIR MUARA	183
5	ALALAK	521
6	MANDASTANA	181
7	RANTAU BADAUH	128
8	BELAWANG	109
9	CERBON	81
10	BAKUMPAI	111
11	KURIPAN	35
12	TABUKAN	86
13	MEKARSARI	121
14	BARAMBAI	115
15	MARABAHAN	196
16	WANARAYA	126
17	JEJANGKIT	55
BARITO KUALA		2536

Jumlah kelahiran di Kabupaten Barito Kuala selama periode terakhir tercatat sebanyak 2.536 kelahiran yang tersebar di 17 kecamatan. Angka ini mencerminkan dinamika demografis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta pelayanan dasar.

Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Alalak mencatat jumlah kelahiran tertinggi dengan 521 kelahiran, disusul oleh Kecamatan Tamban (216 kelahiran) dan Marabahan (196 kelahiran). Sementara itu, jumlah kelahiran terendah tercatat di Kecamatan Kuripan

dengan hanya 35 kelahiran, diikuti oleh Jejangkit (55 kelahiran) dan Cerbon (81 kelahiran).

Sebaran angka kelahiran ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antarwilayah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan tingkat urbanisasi. Kecamatan-kecamatan dengan jumlah kelahiran tinggi umumnya merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat dan akses transportasi yang lebih baik, sehingga pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau.

Data ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan strategis dalam mendukung program kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan populasi, terutama dalam menjamin ketersediaan layanan dasar yang merata dan berkeadilan.

2) Angka Kelahiran Kasar

Tabel 4.23 Angka Kelahiran kasar tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2024	CBR
1	TABUNGANEN	149	21.109	7,06
2	TAMBAN	216	33.058	6,53
3	ANJIR PASAR	123	17.819	6,9
4	ANJIR MUARA	183	23.341	7,84
5	ALALAK	521	64.145	8,12
6	MANDASTANA	181	18.234	9,93
7	RANTAU BADAUH	128	17.171	7,45
8	BELAWANG	109	14.438	7,55
9	CERBON	81	10.307	7,86
10	BAKUMPAI	111	11.194	9,92
11	KURIPAN	35	6.149	5,69
12	TABUKAN	86	9.596	8,96
13	MEKARSARI	121	18.757	6,45
14	BARAMBAI	115	16.470	6,98
15	MARABAHAN	196	22.969	8,53
16	WANARAYA	126	15.075	8,36
17	JEJANGKIT	55	6.904	7,97
BARITO KUALA		2.536	326.736	7,76

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Dari tabel diatas, Kabupaten Barito Kuala mencatat 2.536 kelahiran dari total penduduk sebanyak 326.736 jiwa di pertengahan tahun. Berdasarkan data ini, angka Crude Birth Rate (CBR) — yaitu jumlah kelahiran per 1.000 penduduk — berada pada

angka 7,76, yang menunjukkan bahwa dari setiap 1.000 penduduk, terdapat sekitar 8 bayi lahir dalam setahun. Kecamatan Mandastana mencatat CBR tertinggi sebesar 9,93, dengan 181 kelahiran dari populasi 18.234 jiwa. Tingginya CBR di kecamatan-kecamatan tersebut mencerminkan tingginya dinamika kelahiran terhadap total penduduk dan bisa berkaitan dengan struktur usia muda yang dominan atau tingkat adopsi program keluarga berencana yang masih rendah.

f) **Kematian**

1) **Jumlah Kematian**

Tabel 4.24

Jumlah Kematian berdasarkan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PENERBITAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2024	JUMLAH KEMATIAN TAHUN 2024
1	TABUNGANEN	126	127
2	TAMBAN	167	180
3	ANJIR PASAR	116	116
4	ANJIR MUARA	222	225
5	ALALAK	383	381
6	MANDASTANA	139	139
7	RANTAU BADAUH	226	226
8	BELAWANG	89	90
9	CERBON	79	80
10	BAKUMPAI	70	71
11	KURIPAN	56	56
12	TABUKAN	40	40
13	MEKARSARI	106	107
14	BARAMBAI	97	97
15	MARABAHAN	141	142
16	WANARAYA	69	69
17	JEJANGKIT	62	63
BARITO KUALA		2.188	2.209

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa angka kematian berdasarkan penerbitan akta kematian berjumlah 2.188 jiwa, yang tersebar dalam 17 kecamatan. Kecamatan alalak merupakan kecamatan tertinggi angka kematian yang diterbitkan Akta

Kematian yaitu 383 jiwa, sedangkan Kecamatan Tabukan merupakan kecamatan terendah dengan jumlah 40 jiwa.

2) Angka Kematian Kasar

Tabel 4.25 Angka Kematian Kasar tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2024	ANGKA KEMATIAN KASAR
1	TABUNGANEN	127	21.109	6,02
2	TAMBAN	180	33.058	5,44
3	ANJIR PASAR	116	17.819	6,51
4	ANJIR MUARA	225	23.341	9,64
5	ALALAK	381	64.145	5,94
6	MANDASTANA	139	18.234	7,62
7	RANTAU BADAUH	226	17.171	13,16
8	BELAWANG	90	14.438	6,23
9	CERBON	80	10.307	7,76
10	BAKUMPAI	71	11.194	6,34
11	KURIPAN	56	6.149	9,11
12	TABUKAN	40	9.596	4,17
13	MEKARSARI	107	18.757	5,7
14	BARAMBAI	97	16.470	5,89
15	MARABAHAN	142	22.969	6,18
16	WANARAYA	69	15.075	4,58
17	JEJANGKIT	63	6.904	9,13
BARITO KUALA		2.209	326.736	6,76

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tahun 2024, Kabupaten Barito Kuala mencatat 2.209 kematian dari total penduduk sebanyak 326.736 jiwa di pertengahan tahun. Dengan demikian, angka Crude Death Rate (CDR) atau angka kematian kasar berada pada 6,76 per 1.000 penduduk. Artinya, dari setiap 1.000 orang penduduk, rata-rata terdapat hampir 7 kematian dalam setahun. Kecamatan dengan CDR Tertinggi Rantau Badauh mencatat angka kematian tertinggi dengan CDR sebesar 13,16, hasil dari 226 kematian dengan populasi 17.171 jiwa. Kecamatan lainnya dengan CDR tinggi: Anjir Muara (9,64), Jejangkit (9,13), Kuripan (9,11), Cerbon (7,76), Mandastana (7,62). Tingginya angka kematian di kecamatan-kecamatan tersebut dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, seperti: Tingginya proporsi penduduk lansia, Akses terhadap layanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Perbedaan angka kematian antar kecamatan menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan berbasis wilayah, seperti peningkatan layanan kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, serta intervensi terhadap kelompok rentan.

B. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk Kabupaten Barito Kuala akan menentukan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barito Kuala di masa depan. Menjadi syarat mutlak yaitu kualitas penduduk ditunjang dengan pengembangan sumber daya manusia baik bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kuantitas penduduk yang besar apabila tidak disertai dengan kualitas yang baik, maka tidak akan menjadi kekuatan namun justru akan menjadi beban di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

1. Kesehatan

Data kependudukan menjadi sangat penting bagi pemerintah melakukan verifikasi dan validasi data penduduk untuk bisa menerima pelayanan publik berupa akses kesehatan, data kependudukan menjadi mutlak sifatnya sebagai pintu gerbang masyarakat menerima pelayanan kesehatan bahkan melakukan pendataan kematian. Data yang akurat dan berkualitas diperlukan untuk berbagai keperluan pelayanan, pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan lain-lain. Data kependudukan erat kaitannya dengan bidang kesehatan terutama di Puskesmas dalam memetakan penyakit dalam suatu wilayah, perekapan data penyakit, bahkan bagi masyarakat mengurus kematian (mendapatkan Bantuan/santunan kematian).

a) Kelahiran

1) Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*)

Angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1000 perempuan dalam usia reproduksi (15 - 49 tahun) di Kabupaten Barito Kuala dalam suatu periode tertentu.

Rumusnya :

$$GFR = \frac{B}{W_{15-49}} \times k$$

Keterangan:

B = Jumlah Kelahiran

Pf (15-49) = Jumlah Wanita umur 15 – 49 Tahun

K = 1000

GFR Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah :

$$\frac{2.536}{88.077} \times 1000 = 28,79$$

Angka ini menunjukkan bahwa dari 1000 wanita usia 15 - 49 tahun terdapat 28 - 29 kelahiran.

Berikut data angka kelahiran umum di Kabupaten Barito Kuala :

Tabel 4.26 Angka Kelahiran Umum Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PEREMPUAN USIA 15- 49 TAHUN	GFR
1	TABUNGANEN	149	5.677	26,25
2	TAMBAN	216	8.778	24,61
3	ANJIR PASAR	123	4.642	26,5
4	ANJIR MUARA	183	6.251	29,28
5	ALALAK	521	18.125	28,74
6	MANDASTANA	181	4.940	36,64
7	RANTAU BADAUH	128	4.532	28,24
8	BELAWANG	109	3.716	29,33
9	CERBON	81	2.733	29,64
10	BAKUMPAI	111	3.109	35,7
11	KURIPAN	35	1.671	20,95
12	TABUKAN	86	2.555	33,66
13	MEKARSARI	121	4.899	24,7
14	BARAMBAI	115	4.358	26,39
15	MARABAHAN	196	6.342	30,91
16	WANARAYA	126	3.892	32,37
17	JEJANGKIT	55	1.857	29,62
BARITO KUALA		2.536	88.077	28,79

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Pada tabel 4.22, jumlah kelahiran yang tercatat di Kabupaten Barito Kuala mencapai 2.536 kelahiran, dengan jumlah perempuan usia subur (15–49 tahun) sebanyak 88.077 orang. Hal ini menghasilkan Gross Fertility Rate (GFR) sebesar 28,79, yang menunjukkan bahwa untuk setiap 1.000 perempuan usia subur, terdapat sekitar 29 kelahiran. Kecamatan Mandastana mencatat GFR tertinggi, yaitu 36,64, dari total 181 kelahiran dan 4.940 perempuan usia subur. Kecamatan dengan GFR tinggi lainnya meliputi Bakumpai (35,70), Tabukan (33,66), Wanaraya (32,37), Marabahan (30,91), tingginya GFR di wilayah-wilayah ini mengindikasikan angka kelahiran relatif tinggi dan kemungkinan adanya preferensi terhadap keluarga besar atau keterbatasan akses terhadap program keluarga berencana. Kecamatan dengan GFR Terendah Kuripan, yaitu 20,95, dengan 35 kelahiran dari 1.671 perempuan usia subur. Hal ini dapat mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran atau perubahan pola pikir masyarakat terhadap jumlah anak ideal. Perbedaan GFR antar kecamatan menunjukkan adanya variasi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pola kelahiran di masyarakat.

2) Rasio Ibu dan Anak Perempuan

Tabel 4.27 Rasio Ibu dan Anak

NO	KECAMATAN	PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	UMUR ANAK	CWR
1	TABUNGANEN	5.677	1.325	23,34
2	TAMBAN	8.778	1.899	21,63
3	ANJIR PASAR	4.642	1.086	23,4
4	ANJIR MUARA	6.251	1.495	23,92
5	ALALAK	18.125	4.487	24,76
6	MANDASTANA	4.940	1.262	25,55
7	RANTAU BADAUH	4.532	1.109	24,47
8	BELAWANG	3.716	922	24,81
9	CERBON	2.733	628	22,98
10	BAKUMPAI	3.109	823	26,47
11	KURIPAN	1.671	420	25,13
12	TABUKAN	2.555	671	26,26
13	MEKARSARI	4.899	1.151	23,49
14	BARAMBAI	4.358	1.075	24,67
15	MARABAHAN	6.342	1.549	24,42
16	WANARAYA	3.892	1.018	26,16
17	JEJANGKIT	1.857	477	25,69
BARITO KUALA		88.077	21.397	24,29

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Rasio anak dan perempuan merupakan perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran yang terjadi selama lima tahun yang lalu. Pada tabel di atas dilihat ada 21. 397 anak kelompok usia 0-4 tahun di Kabupaen Barito Kuala sedangkan jumlah perempuan pada kelompok usia 15-49 tahun sebanyak 88.077 jiwa sehingga dapat memperlihatkan bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 24 anak balita.

b) Kematian

Kematian atau mortalitas sangat mempengaruhi jumlah struktur dan komposisi penduduk. Pengaruh kematian adalah mengurangi jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Kematian dapat terjadi pada penduduk laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usiaremaja, usia dewasa maupun usia tua. Besar kecilnya kematian menurut karakteristik tersebut berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perubahan struktur umur dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah. Kasus kematian dalam jumlah yang besar menjadi suatu masalah yang dapat berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, adat istiadat maupun kondisi kesehatan lingkungan.

Peristiwa kematian terjadi secara mendadak karena insiden kecelakaan maupun melalui serangkaian peristiwa mengalami sakit. Saat ini cukup banyak dan beragam jenis penyakit yang dapat menimbulkan kematian. Banyak kematian terjadi kepada penduduk

usia muda dan dewasa dikarenakan kecelakaan, atau terkena penyakit menular. Sementara itu, kasus kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernapasan bagian atas (ISPA) dan diare. yang merupakan penyakit akibat infeksi kuman. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Mortalitas menjadi penting dan diperlukan untuk mengevaluasi program pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala. Parameter mortalitas yang sering digunakan adalah angka yang menyatakan banyaknya peristiwa kematian menurut karakteristik tertentu dari jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu.

1) Kematian Bayi dan Balita

Tabel 4.28 Angka Kematian berdasarkan Kasus Kematian Bayi dan Balita

NO	KECAMATAN	KEMATIAN BAYI	KEMATIAN BALITA
1	TABUNGANEN	1	0
2	TAMBAN	2	0
3	ANJIR PASAR	1	0
4	ANJIR MUARA	3	0
5	ALALAK	5	1
6	MANDASTANA	2	0
7	RANTAU BADAUH	0	0
8	BELAWANG	0	0
9	CERBON	0	0
10	BAKUMPAI	1	0
11	KURIPAN	0	0
12	TABUKAN	1	0
13	MEKARSARI	5	0
14	BARAMBAI	0	0
15	MARABAHAN	5	0
16	WANARAYA	0	0
17	JEJANGKIT	1	0
JUMLAH		27	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Sepanjang tahun 2024, jumlah kematian bayi (usia di bawah 1 tahun) di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 27 kasus, sedangkan kematian balita (usia 1–4 tahun) tercatat hanya 1 kasus. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pada anak usia dini terjadi pada masa bayi. Kecamatan dengan angka kematian bayi tertinggi adalah: Alalak, Mekarsari, dan Marabahan, masing-masing mencatat 5 kematian bayi. Disusul oleh Anjir Muara (3 kasus), Mandastana dan Tamban (2 kasus), Sementara kecamatan lainnya mencatat 1 atau tidak ada kasus. Satu-satunya kematian balita terjadi di Kecamatan Alalak. Ini menjadikan Alalak sebagai wilayah dengan beban kematian anak usia dini tertinggi secara absolut, yaitu 6 kasus (5 bayi dan 1 balita). Kecamatan Tanpa Kematian Bayi dan Balita Sebanyak 7 kecamatan tidak melaporkan adanya

kematian bayi maupun balita, yaitu: Rantau Badauh, Belawang, Cerbon, Kuripan, Barambai, Wanaraya dan Jejangkit (hanya 1 kematian bayi, tanpa balita). Hal ini bisa mencerminkan bahwa Perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, Akses lebih baik terhadap imunisasi dan peningkatan kesadaran gizi serta perawatan neonatal.

Rendahnya kematian balita (1 kasus) merupakan indikator positif, namun tetap perlu perhatian berkelanjutan terhadap upaya preventif seperti perawatan kehamilan, persalinan aman, ASI eksklusif, serta gizi seimbang.

2) Kematian Ibu

Tabel 4.29

Angka Kematian Ibu berdasarkan kasus Kematian Ibu tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEMATIAN IBU
1	TABUNGANEN	1
2	TAMBAN	2
3	ANJIR PASAR	0
4	ANJIR MUARA	1
5	ALALAK	0
6	MANDASTANA	0
7	RANTAU BADAUH	0
8	BELAWANG	0
9	CERBON	0
10	BAKUMPAI	0
11	KURIPAN	0
12	TABUKAN	0
13	MEKARSARI	1
14	BARAMBAI	0
15	MARABAHAN	0
16	WANARAYA	0
17	JEJANGKIT	0
JUMLAH		5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

pada tahun 2024, jumlah kematian ibu di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebanyak 5 kasus. Kematian ibu ini merujuk pada kematian perempuan saat hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah persalinan), yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan ibu dan sistem pelayanan kebidanan di suatu wilayah. Distribusi Kematian Ibu per Kecamatan Dari total 17 kecamatan di Barito Kuala, hanya empat kecamatan yang melaporkan adanya kasus kematian ibu, yaitu: Tamban: 2 kasus (kasus tertinggi), Tabunganen: 1 kasus, Anjir Muara: 1 kasus, Mekarsari: 1 kasus. Sementara 13 kecamatan lainnya tidak mencatat adanya kematian ibu selama tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Barito Kuala sudah relatif aman dari risiko kematian ibu, meskipun kasus yang terjadi di beberapa kecamatan tetap memerlukan perhatian khusus. Upaya pencegahan melalui

penguatan layanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta pemantauan kondisi kehamilan secara rutin sangat penting untuk menekan angka kematian ibu di tahun-tahun mendatang.

2. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah presentasi penduduk umur 15 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengikuti kalimat sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Angka Melek huruf (AMH) berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menunjukkan pula kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga Angka Melek Huruf (AMH) ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap perkembangan daerah.

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan capaian yang cukup tinggi, yakni sebesar 96,67%. Hal ini menandakan bahwa mayoritas penduduk di wilayah ini telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, yang merupakan fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, data juga memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 3,33% penduduk yang belum melek huruf. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam upaya pemerataan pendidikan dan literasi di seluruh wilayah kabupaten, khususnya di daerah terpencil atau dengan akses pendidikan yang terbatas.

Capaian 96,67% menunjukkan keberhasilan program pendidikan dasar dan pemberantasan buta huruf yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, penduduk yang belum melek huruf masih perlu mendapatkan perhatian, baik melalui program pendidikan nonformal seperti Kejar Paket A/B, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis literasi di tingkat desa. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menjangkau kelompok usia dewasa yang belum tersentuh pendidikan formal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemampuan baca-tulis dalam kehidupan sehari-hari.

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai pada wilayah tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat

murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan.

Tabel 4.30 Capaian Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator	Capaian (%)
1	PAUD/Sederajat	110,47
2	SD/Sederajat	105,02
3	SMP/Sederajat	103,35
4	Non Formal/ Kesetaraan	92,06

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Dari data tersebut tampak Capaian indikator pendidikan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebagian besar jenjang pendidikan dasar dan menengah telah melampaui target 100%, yang menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Berikut rincian capaian menurut masing-masing indikator :

- i. PAUD/Sederajat mencapai 110,47%, menandakan bahwa partisipasi anak usia dini dalam pendidikan sangat tinggi, bahkan melebihi jumlah populasi sasaran, kemungkinan karena inklusi anak usia di bawah maupun di atas kelompok usia standar PAUD.
- ii. SD/Sederajat mencatat capaian sebesar 105,02%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah terlayani, termasuk beberapa peserta didik yang mungkin berasal dari luar daerah.
- iii. SMP/Sederajat mencapai 103,35%, menandakan bahwa partisipasi pendidikan menengah pertama juga sangat baik dan melampaui target.
- iv. Pendidikan Non Formal/Kesetaraan memiliki capaian 92,06%. Meskipun belum mencapai 100%, angka ini menunjukkan kemajuan yang positif dalam menjangkau kelompok yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, seperti program Paket A, B, dan C.

Secara umum, capaian pendidikan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan telah berhasil, terutama di jalur pendidikan formal. Ke depan, perhatian lebih dapat difokuskan pada :

- i. Peningkatan capaian pendidikan non formal, termasuk peningkatan kualitas, kuantitas tutor, dan sarana pembelajaran.
- ii. Pemerataan akses dan mutu pendidikan hingga ke daerah terpencil dan kelompok rentan.
- iii. Pemeliharaan kualitas layanan PAUD, agar tidak hanya kuantitas tetapi juga mutu pendidikan anak usia dini terus meningkat.

c) Angka Partisipasi Murni

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. Berikut Capaian Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Tabel 4.31 Capaian Angka Partisipasi Murni

No	Indikator	Capaian angka partisipasi murni (%)
1	PAUD/Sederajat	92,91
2	SD/Sederajat	98,39
3	SMP/Sederajat	94,42
4	Non Formal/ Kesetaraan	85,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan nonformal berada dalam kondisi yang cukup baik, dengan beberapa indikator mencapai angka mendekati sempurna.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau sederajat, APM mencapai 92,91%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia dini telah mengikuti layanan pendidikan sesuai usia, yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan kognitif, afektif, dan motorik anak.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, APM tercatat sebesar 98,39%, yang berarti hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah bersekolah sesuai kelompok usianya. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar secara menyeluruh.

Selanjutnya, APM pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mencapai 94,42%. Meski sedikit lebih rendah dari jenjang SD, angka ini masih tergolong tinggi dan menandakan bahwa sebagian besar anak usia 13–15 tahun telah melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama.

Sementara itu, untuk jalur nonformal atau kesetaraan, capaian APM berada di angka 85,81%. Angka ini cukup menggembirakan, karena mencerminkan adanya alternatif pendidikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses jalur formal karena berbagai kendala.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala telah menunjukkan performa yang baik dalam hal pemerataan pendidikan, terutama dalam menjangkau kelompok usia sekolah secara tepat sasaran. Meski demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan APM, khususnya pada jalur nonformal, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian di jenjang lainnya.

d) Angka Putus Sekolah

Pada tahun 2024, angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 0,55 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 anak usia sekolah dasar, terdapat kurang dari satu anak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga tamat.

Capaian ini mencerminkan upaya positif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dasar. Angka putus sekolah yang relatif rendah ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan retensi peserta didik di jenjang pendidikan dasar.

Meski demikian, angka 0,55 persen tetap perlu menjadi perhatian, karena setiap anak yang putus sekolah memiliki potensi kehilangan hak atas pendidikan yang berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat preventif dan responsif, seperti identifikasi dini siswa berisiko putus sekolah, pendampingan sosial, dan pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, perlu terus diperkuat.

Dengan menjaga angka putus sekolah tetap rendah dan mendorong partisipasi pendidikan yang tinggi, Kabupaten Barito Kuala akan semakin kokoh dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan sejak dari pendidikan dasar.

3. Ekonomi

a) Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan keseluruhan penduduk yang telah memasuki usia produktif, baik itu yang telah bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau masih menganggur. Sedangkan tenaga kerja merupakan penduduk pada usia produktif yang telah bekerja secara aktif baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun masyarakat.

1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15–64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu, juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 4.32 Jumlah Usia Kerja Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	USIA KERJA	JUMLAH PENDUDUK	%
1	TABUNGANEN	14.935	21.199	70,45
2	TAMBAN	23.776	33.202	71,61
3	ANJIR PASAR	12.703	17.967	70,7
4	ANJIR MUARA	16.630	23.437	70,96
5	ALALAK	46.586	65.537	71,08
6	MANDASTANA	12.762	18.408	69,33
7	RANTAU BADAUH	12.153	17.258	70,42
8	BELAWANG	10.253	14.513	70,65
9	CERBON	7.332	10.365	70,74
10	BAKUMPAI	8.139	11.300	72,03
11	KURIPAN	4.492	6.166	72,85
12	TABUKAN	6.678	9.645	69,24
13	MEKARSARI	13.244	18.871	70,18
14	BARAMBAI	11.621	16.543	70,25
15	MARABAHAN	16.489	23.194	71,09
16	WANARAYA	10.418	15.291	68,13
17	JEJANGKIT	4.877	6.903	70,65
BARITO KUALA		233.088	329.799	70,68

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan Tabel diatas, Kabupaten Barito Kuala memiliki jumlah penduduk usia kerja sebanyak 233.088 jiwa dari total 329.799 jiwa, atau setara dengan 70,68% dari total populasi. Distribusi penduduk usia kerja di masing-masing kecamatan juga menunjukkan proporsi yang relatif stabil dengan kisaran 68% hingga 73%. Kecamatan dengan persentase usia kerja tertinggi tercatat di Kuripan 72,85%, Bakumpai 72,03%, Alalak dan Marabahan juga menunjukkan angka tinggi yaitu sekitar 71,08% dan 71,09%. Sedangkan kecamatan dengan proporsi usia kerja terendah adalah Wanaraya 68,13%, Tabukan 69,24%, Mandastana 69,33%

Tingginya proporsi penduduk usia kerja (sekitar 70,68%) menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala berada dalam fase bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada dalam usia produktif. Ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan produktivitas daerah jika dibarengi dengan :

- Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
- Pembukaan lapangan kerja yang luas
- Peningkatan kualitas SDM, khususnya sektor pertanian, UMKM, dan industri kreatif yang dominan di wilayah ini
- Pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi usia kerja ini dengan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen/hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya

Tabel 4.33 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

NO	KECAMATAN	ANGKATAN KERJA			USIA KERJA			ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	6.264	1.204	7.468	7.636	7.299	14.935	82,03	16,50	50,00
2	TAMBAN	9.897	4.062	13.959	12.122	11.654	23.776	81,64	34,85	58,71
3	ANJIR PASAR	5.132	2.509	7.641	6.420	6.283	12.703	79,94	39,93	60,15
4	ANJIR MUARA	7.147	2.742	9.889	8.465	8.165	16.630	84,43	33,58	59,46
5	ALALAK	18.513	6.025	24.538	23.519	23.067	46.586	78,72	26,12	52,67
6	MANDASTANA	5.263	1.686	6.949	6.443	6.319	12.762	81,69	26,68	54,45
7	RANTAU BADAUH	5.064	2.628	7.692	6.109	6.044	12.153	82,89	43,48	63,29
8	BELAWANG	4.445	2.125	6.570	5.231	5.022	10.253	84,97	42,31	64,08
9	CERBON	3.160	1.809	4.969	3.743	3.589	7.332	84,42	50,40	67,77
10	BAKUMPAI	3.606	954	4.560	4.231	3.908	8.139	85,23	24,41	56,03
11	KURIPAN	1.884	408	2.292	2.326	2.166	4.492	81,00	18,84	51,02
12	TABUKAN	2.972	1.529	4.501	3.430	3.248	6.678	86,65	47,08	67,4
13	MEKARSARI	5.650	2.652	8.302	6.764	6.480	13.244	83,53	40,93	62,68
14	BARAMBAI	4.993	3.093	8.086	5.902	5.719	11.621	84,60	54,08	69,58
15	MARABAHAN	6.508	3.572	10.080	8.199	8.290	16.489	79,38	43,09	61,13
16	WANARAYA	4.527	1.665	6.192	5.278	5.140	10.418	85,77	32,39	59,44
17	JEJANGKIT	2.060	758	2.818	2.526	2.351	4.877	81,55	32,24	57,78
BARITO KUALA		97.085	39.421	136.506	118.344	114.744	233.088	82,04	34,36	58,56

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2024, APAK Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan mencapai 58,56%, dengan partisipasi laki-laki sebesar 82,04%, dan perempuan sebesar 34,36%.

Kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar, menunjukkan adanya potensi tenaga kerja perempuan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, kemungkinan karena keterbatasan akses pekerjaan, tanggung jawab domestik, atau budaya setempat. Beberapa kecamatan mencatat partisipasi angkatan kerja tertinggi, yaitu Barambai 69,58%, Cerbon 67,77%, Tabukan 67,40%, Belawang 64,08%, Rantau Badauh 63,29%. Kecamatan-kecamatan ini menunjukkan keterlibatan yang baik dari penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, termasuk kontribusi signifikan dari perempuan (di atas 40% di beberapa kecamatan). Sebaliknya, partisipasi paling rendah tercatat di Kuripan 51,02%, Tabunganen 50,00%, Alalak 52,67%. Angka ini

mengindikasikan perlunya intervensi untuk memperluas akses kerja, pelatihan, atau penyediaan infrastruktur penunjang kerja khususnya di daerah-daerah tersebut.

Penguatan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses pelatihan kerja, dan pengembangan UMKM berbasis lokal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi. Kecamatan dengan angka rendah memerlukan intervensi lebih lanjut melalui program padat karya, inkubasi wirausaha, serta perluasan sektor informal yang produktif.

c) Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 4.34 Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	34.641	30.444	65.085
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	7	60.836	60.843
3	PELAJAR/MAHASISWA	34.213	30.300	64.513
4	PENSIUNAN	969	379	1.348
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2.613	2.617	5.230
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	208	0	208
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	525	30	555
8	PERDAGANGAN	264	138	402
9	PETANI/PEKEBUN	38.509	21.845	60.354
10	PETERNAK	20	8	28
11	NELAYAN/PERIKANAN	433	21	454
12	INDUSTRI	7	4	11
13	KONSTRUKSI	21	0	21
14	TRANSPORTASI	120	6	126
15	KARYAWAN SWASTA	14.176	4.159	18.335
16	KARYAWAN BUMN	142	36	178
17	KARYAWAN BUMD	72	31	103
18	KARYAWAN HONORER	1.193	1.754	2.947
19	BURUH HARIAN LEPAS	3.248	94	3.342
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.005	399	1.404
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	10	0	10
22	BURUH PETERNAKAN	5	1	6
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	25	25
24	TUKANG CUKUR	14	0	14
25	TUKANG LISTRIK	9	0	9
26	TUKANG BATU	48	0	48
27	TUKANG KAYU	159	1	160
28	TUKANG SOL SEPATU	2	0	2
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	32	0	32
30	TUKANG JAHIT	33	37	70
31	PENATA RIAS	3	8	11
32	PENATA BUSANA	0	0	0
33	PENATA RAMBUT	2	4	6
34	MEKANIK	106	0	106
35	SENIMAN	5	1	6
36	PENTERJEMAH	0	1	1
37	IMAM MASJID	7	0	7
38	PENDETA	8	2	10
39	WARTAWAN	14	0	14
40	USTADZ/MUBALIGH	18	3	21
41	JURU MASAK	1	3	4
42	ANGGOTA BPK	1	0	1
43	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	15	2	17
44	DOSEN	57	46	103
45	GURU	494	1.187	1.681
46	PENGACARA	4	4	8
47	NOTARIS	2	0	2

48	ARSITEK	2	0	2
49	AKUNTAN	1	0	1
50	KONSULTAN	8	0	8
51	DOKTER	16	29	45
52	BIDAN	0	112	112
53	PERAWAT	69	112	181
54	APOTEKER	4	20	24
55	PELAUT	69	0	69
56	PENELITI	2	1	3
57	SOPIR	235	0	235
58	PIALANG	1	0	1
59	PARANORMAL	1	0	1
60	PEDAGANG	1.374	695	2.069
61	PERANGKAT DESA	322	188	510
62	KEPALA DESA	50	3	53
63	WIRASWASTA	31.469	7.112	38.581
64	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA	11	3	14
65	MANAJER	1	0	1
66	TENAGA TATA USAHA	0	1	1
67	TEKNISI	1	0	1
68	PEKERJAAN LAINNYA	15	11	26
BARITO KUALA		167.086	162.713	329.799

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Berdasarkan data jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dari total 329.799 jiwa, terdapat distribusi pekerjaan yang sangat beragam, mencerminkan karakteristik daerah yang dominan dengan aktivitas agraris serta sektor informal.

Sebagian besar penduduk masih tergolong belum/tidak bekerja dan belum memasuki dunia kerja, yang meliputi : Belum/Tidak Bekerja: 65.085 jiwa (19,74%), Mengurus Rumah Tangga: 60.843 jiwa (18,45%) – mayoritas perempuan, Pelajar/Mahasiswa: 64.513 jiwa (19,56%). tiga kelompok ini mencakup hampir 58% dari total penduduk, yang menunjukkan beban ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk usia kerja aktif. Sebagaimana karakteristik wilayah perdesaan, sektor pertanian/perkebunan menjadi tulang punggung utama lapangan kerja Petani/Pekebun: 60.354 jiwa (18,3%), Wiraswasta: 38.581 jiwa (11,7%) dan Pedagang: 2.069 jiwa (0,63%)

Sektor ini didominasi oleh laki-laki, meskipun peran perempuan cukup signifikan dalam kegiatan wiraswasta dan perdagangan kecil.

4. Sosial

a) Proporsi Penduduk menurut penyandang Disabilitas

Indikator Angka Penduduk Penyandang Cacat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk penyandang disabilitas dengan jumlah penduduk. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat menurut jenis kecacatannya. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 0,30% dari total populasi. Dengan total jumlah penduduk 329.799 jiwa, maka diperkirakan terdapat

sekitar 989 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas di wilayah ini.

Meskipun persentasenya relatif kecil, keberadaan kelompok ini tetap menjadi bagian penting dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal:

- Aksesibilitas terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
- Pemberdayaan ekonomi, melalui pelatihan keterampilan kerja inklusif.
- Perlindungan sosial dan hukum, agar mereka memperoleh hak dan kesempatan yang setara.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat pendataan yang inklusif dan akurat, serta menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan para penyandang disabilitas, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

C. Mobilitas

Mobilitas penduduk yang permanen atau dikenal dengan migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi Internasional) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*Push Factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*Pull Factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain.

Mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya dorong disebut migrasi keluar, sedangkan mobilitas penduduk yang dipengaruhi oleh daya tarik disebut migrasi masuk.

1. Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk (*In Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$\begin{aligned} \text{AMM} &= \frac{\text{banyaknya migran masuk}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000 \\ &= \frac{9.248}{329.799} \times 1000 = 28,04 \end{aligned}$$

Angka migrasi masuk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah 28,04. Hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi masuk sebanyak 28 jiwa.

Berikut data migrasi penduduk masuk ke Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 berdasarkan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4.35 Jumlah Migran Masuk

NO	KECAMATAN	MIGRAN MASUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	101	272	373
2	TAMBAN	169	504	673
3	ANJIR PASAR	97	271	368
4	ANJIR MUARA	118	332	450
5	ALALAK	801	2,682	3,483
6	MANDASTANA	101	338	439
7	RANTAU BADAUH	72	233	305
8	BELAWANG	79	207	286
9	CERBON	64	199	263
10	BAKUMPAI	66	184	250
11	KURIPAN	44	102	146
12	TABUKAN	62	139	201
13	MEKARSARI	99	296	395
14	BARAMBAI	77	242	319
15	MARABAHAN	171	575	746
16	WANARAYA	102	314	416
17	JEJANGKIT	26	109	135
BARITO KUALA		2,249	6,999	9,248

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Barito Kuala mencatat total 9.248 jiwa migran masuk, yang terdiri atas 2.249 laki-laki dan 6.999 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa proporsi migran perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 75,7% dari total migran masuk. Kecamatan dengan jumlah migrasi masuk tertinggi adalah Alalak dengan 3.483 jiwa (801 laki-laki dan 2.682 perempuan), Disusul oleh Marabahan sebanyak 746 jiwa, dan Tamban dengan 673 jiwa. Sementara itu, jumlah migran masuk terendah tercatat di Kecamatan Jejangkit, yaitu sebanyak 135 jiwa. Fenomena migrasi masuk ini dapat mencerminkan Daya tarik ekonomi atau peluang kerja di wilayah tertentu, Perpindahan karena pendidikan atau pernikahan, Serta faktor sosial lainnya seperti akses terhadap layanan kesehatan atau infrastruktur.

Dominasi migran perempuan juga menjadi catatan penting untuk pengambilan kebijakan yang responsif gender, terutama dalam perencanaan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi di tingkat kecamatan.

2. Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar (*Out Migration Rate*) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

$$AMK = \frac{\text{banyaknya Migran keluar}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000 = \frac{9.380}{329.799} \times 1000 = 28,44$$

Angka migrasi keluar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah 28,44, hal ini berarti dari 1000 penduduk terjadi migrasi keluar sebanyak 28 jiwa.

Tabel 4.36 Jumlah Migran Keluar

NO	KECAMATAN	MIGRAN KELUAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	255	249	504
2	TAMBAN	469	471	940
3	ANJIR PASAR	224	210	434
4	ANJIR MUARA	339	303	642
5	ALALAK	1,114	1,127	2,241
6	MANDASTANA	255	231	486
7	RANTAU BADAUH	164	184	348
8	BELAWANG	201	192	393
9	CERBON	162	145	307
10	BAKUMPAI	126	133	259
11	KURIPAN	96	88	184
12	TABUKAN	141	137	278
13	MEKARSARI	236	246	482
14	BARAMBAI	203	216	419
15	MARABAHAN	383	379	762
16	WANARAYA	233	239	472
17	JEJANGKIT	123	106	229
BARITO KUALA		4,724	4,656	9,380

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Data migrasi keluar Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan bahwa angka migrasi keluar relatif signifikan, dengan total 9,380 orang yang meninggalkan wilayah tersebut. Migrasi ini mencakup 4,724 laki-laki dan 4,656 perempuan, yang menunjukkan distribusi yang hampir seimbang antara jenis kelamin.

Beberapa kecamatan, seperti Alalak, Tamban, dan Anjir Muara, memiliki angka migrasi keluar yang sangat tinggi, mencerminkan kemungkinan adanya faktor-faktor yang mendorong penduduk untuk berpindah, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, atau faktor sosial lainnya. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan seperti Kuripan, Cerbon, dan Jejangkit menunjukkan angka migrasi yang lebih rendah, yang mungkin mengindikasikan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, angka migrasi keluar sebesar 28,44 per 1,000 penduduk memberikan gambaran bahwa ada tekanan atau peluang di luar Kabupaten Barito Kuala yang menarik bagi penduduk untuk berpindah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab migrasi ini dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat mengurangi dampak negatifnya, seperti berkurangnya jumlah tenaga kerja atau peningkatan ketimpangan sosial antar wilayah.

3. Migrasi Neto

Angka Migrasi Netto (*Net Migration*) yaitu selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif.

Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negatif. Angka migrasi netto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk daerah tersebut.

Rumus :

$$MN = \frac{\text{Banyaknya migran masuk} - \text{banyaknya migran keluar}}{\text{banyaknya penduduk}} \times 1000$$

$$= \frac{9.248 - 9.380}{329.799} \times 1000 = -0,40$$

Angka Migrasi Netto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah -0.40 Hal ini berarti angka migrasi masuk dan migrasi keluar hampir sama. Migrasi Netto Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 adalah Migrasi Netto Negatif, perpindahan lebih banyak dibandingkan penduduk masuk.

Jadi Migrasi Netto Kota Barito Kuala Tahun 2024 adalah Migrasi Netto Negatif adalah 0 jiwa. Berikut Migrasi Netto Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 :

Tabel 3.37 Migrasi Netto

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI MASUK	MIGRASI KELUAR	MIGRASI NETTO
1	TABUNGANEN	21.199	373	504	-6,18
2	TAMBAN	33.202	673	940	-8,04
3	ANJIR PASAR	17.967	368	434	-3,67
4	ANJIR MUARA	23.437	450	642	-8,19
5	ALALAK	65.537	3.483	2.241	0,02
6	MANDASTANA	18.408	439	486	-2,55
7	RANTAU BADAUH	17.258	305	348	-2,49
8	BELAWANG	14.513	286	393	-7,37
9	CERBON	10.365	263	307	-4,25
10	BAKUMPAI	11.300	250	259	-0,80
11	KURIPAN	6.166	146	184	-6,16
12	TABUKAN	9.645	201	278	-7,98
13	MEKARSARI	18.871	395	482	-4,61
14	BARAMBAI	16.543	319	419	-6,04
15	MARABAHAN	23.194	746	762	-0,69
16	WANARAYA	15.291	416	472	-3,66
17	JEJANGKIT	6.903	135	229	-13,62
BARITO KUALA		329.799	9.248	9.380	-0,40

Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI

Angka Migrasi Netto Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 menunjukkan nilai negatif sebesar -0,40. Angka ini menggambarkan bahwa jumlah migrasi keluar dari daerah ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah migrasi masuk, yang berarti Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan jumlah penduduk akibat migrasi.

Secara spesifik, angka negatif ini mengindikasikan bahwa sekitar 0,40 per 1,000 penduduk meninggalkan wilayah ini lebih banyak daripada yang datang. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa daerah ini mungkin kurang mampu menarik penduduk baru atau mempertahankan penduduknya, baik karena faktor ekonomi, kurangnya peluang kerja, atau mungkin ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan penduduk setempat.

Meskipun angka migrasi netto ini relatif kecil, namun jika dibiarkan berlanjut, dapat berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan migrasi keluar ini, seperti peningkatan lapangan kerja, kualitas pendidikan, dan fasilitas publik, guna mengurangi angka migrasi keluar dan menarik penduduk baru untuk menetap di daerah ini.

Diperlukan langkah strategis untuk menciptakan daya tarik bagi penduduk baik dari dalam maupun luar daerah agar angka migrasi netto menjadi lebih positif di masa depan

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDUDUK

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan tersebut sebagai bukti diri untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan dan sebagainya. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan dokumen, kualitas pelayanan dan kualitas informasi pelayanan kependudukan. Pemberian dokumen kependudukan bersifat *stelsel* aktif, dimana penduduk harus aktif untuk melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, tetapi pemerintah tetap berperan aktif dan berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran untuk mengupdate data kependudukan merupakan usaha agar data dalam database kependudukan sesuai dengan dokumen dan realitas yang dimiliki penduduk

A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen Kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan antara Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarganya. Kartu keluarga merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, hubungan dengan kepala keluarga, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, NIK. Kartu keluarga harus dimutakhirkan setiap kali terjadi peristiwa mutasi kependudukan seperti kelahiran anak, kematian, perpindahan anggota keluarga, perkawinan, dan perceraian, serta perubahan pada pendidikan dan pekerjaan. Kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Jumlah Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KK	MEMILIKI KK	BELUM CETAK KK	TELAH CETAK KK (%)
1	TABUNGANEN	7.534	7.410	124	98,35
2	TAMBAN	11.645	11.519	126	98,92
3	ANJIR PASAR	6.415	6.338	77	98,80
4	ANJIR MUARA	8.014	7.944	70	99,13
5	ALALAK	21.335	21.201	134	99,37
6	MANDASTANA	6.227	6.189	38	99,39
7	RANTAU BADAUH	5.917	5.835	82	98,61
8	BELAWANG	5.121	5.083	38	99,26
9	CERBON	3.626	3.591	35	99,03
10	BAKUMPAI	3.982	3.928	54	98,64
11	KURIPAN	2.203	2.176	27	98,77
12	TABUKAN	3.353	3.330	23	99,31
13	MEKARSARI	6.481	6.400	81	98,75
14	BARAMBAI	5.574	5.544	30	99,46
15	MARABAHAN	7.935	7.886	49	99,38
16	WANARAYA	5.363	5.277	86	98,40
17	JEJANGKIT	2.340	2.316	24	98,97
BARITO KUALA		113.065	111.967	1.098	99,03

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data rekapitulasi kepemilikan Kartu Keluarga (KK), terlihat bahwa mayoritas penduduk telah memiliki KK sebagai dokumen administrasi dasar dalam sistem kependudukan. Capaian ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup baik terhadap pentingnya dokumen kependudukan dalam mengakses layanan publik.

Sebagian kecil penduduk tercatat belum memiliki KK. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perpindahan domisili yang belum dilaporkan, pernikahan baru yang belum dicatat secara administratif, atau kendala akses ke layanan administrasi.

Upaya peningkatan cakupan kepemilikan KK perlu terus dilakukan melalui edukasi, pelayanan jemput bola, serta penyederhanaan proses administrasi agar seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan secara lengkap dan sah

Pada tabel diatas Kalau dilihat dari persentase Kepemilikan Kartu Keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Barambai yaitu (99,46%) menyusul kecamatan mandastana (99,39%). sedangkan Kepemilikan Kartu Keluarga terendah di Kecamatan Tabunganen yaitu 98,35%.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)

Kartu Tanda Penduduk elektronik selanjutnya disingkat KTP – el merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP – el ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah. Dengan segala keperluan KTP- el, penduduk dapat dengan mudah

mengurus semua yang berkaitan dengan Legislatif, sebagai contoh urusan dengan Bank, mengurus Jamkesmas, untuk mengurus Perkawinan, dan lain sebagainya

Tabel 5.2

**JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	WKTP DINAMIS	PROGRES REKAM	PROGRES BELUM REKAM	KEPEMILIKAN KTP -el	% KEPEMILIKAN KTP - el
1	TABUNGANEN	15.398	15.314	84	15.098	98,59
2	TAMBAN	24.752	24.660	92	24.433	99,08
3	ANJIR PASAR	13.348	13.306	42	13.237	99,48
4	ANJIR MUARA	17.016	16.944	72	16.848	99,43
5	ALALAK	46.986	46.786	200	46.423	99,22
6	MANDASTANA	13.267	13.217	50	13.125	99,30
7	RANTAU BADAUH	12.666	12.617	49	12.540	99,39
8	BELAWANG	10.784	10.730	54	10.639	99,15
9	CERBON	7.635	7.609	26	7.578	99,59
10	BAKUMPAI	8.281	8.271	10	8.242	99,65
11	KURIPAN	4.577	4.555	22	4.533	99,52
12	TABUKAN	6.903	6.870	33	6.820	99,27
13	MEKARSARI	13.886	13.849	37	13.807	99,70
14	BARAMBAI	12.019	11.990	29	11.895	99,21
15	MARABAHAN	17.138	17.112	26	17.040	99,58
16	WANARAYA	11.235	11.187	48	11.084	99,08
17	JEJANGKIT	5.026	5.011	15	4.943	98,64
BARITO KUALA		240.917	240.028	889	238.285	99,27

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data target dan realisasi perekaman KTP elektronik (KTP-el), secara umum capaian kepemilikan KTP-el menunjukkan tren positif. Sebagian besar penduduk yang wajib KTP telah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el.

Persentase kepemilikan KTP-el berada pada kisaran tinggi, menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas ini cukup tinggi. Di beberapa wilayah, capaian bahkan mendekati atau mencapai 100%. Namun, masih terdapat beberapa kecamatan/desa yang persentasenya berada di bawah target, sehingga perlu perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi belum optimalnya perekaman di beberapa daerah antara lain: lokasi geografis yang sulit dijangkau, kurangnya informasi, atau kendala teknis dalam proses perekaman. Oleh karena itu, strategi seperti pelayanan jemput bola dan integrasi data antarinstansi menjadi penting untuk meningkatkan kepemilikan KTP-el secara merata.

C. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang menjadi bukti bahwa orang tersebut

diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Dengan memiliki KIA, seorang anak dapat dengan mudah mengurus legalitas administrasi serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, pendidikan dan sebagainya, proporsi penduduk yang sudah memiliki KIA disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KECAMATAN	WAJIB KIA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			KEPEMILIKAN KIA (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	2.928	2.786	5.714	2.576	2.450	5.026	352	336	688	87,96
2	TAMBAN	4.348	4.106	8.454	3.955	3.749	7.704	393	357	750	91,13
3	ANJIR PASAR	2.372	2.235	4.607	2.044	1.941	3.985	328	294	622	86,50
4	ANJIR MUARA	3.310	3.113	6.423	2.876	2.714	5.590	434	399	833	87,03
5	ALALAK	9.546	9.093	18.639	8.353	7.995	16.348	1.193	1.098	2.291	87,71
6	MANDASTANA	2.641	2.526	5.167	2.452	2.358	4.810	189	168	357	93,09
7	RANTAU BADAUH	2.328	2.262	4.590	2.101	2.049	4.150	227	213	440	90,41
8	BELAWANG	1.954	1.768	3.722	1.779	1.647	3.426	175	121	296	92,05
9	CERBON	1.389	1.341	2.730	1.272	1.219	2.491	117	122	239	91,25
10	BAKUMPAI	1.579	1.436	3.015	1.455	1.326	2.781	124	110	234	92,24
11	KURIPAN	826	769	1.595	789	729	1.518	37	40	77	95,17
12	TABUKAN	1.345	1.398	2.743	1.224	1.246	2.470	121	152	273	90,05
13	MEKARSARI	2.599	2.386	4.985	2.491	2.292	4.783	108	94	202	95,95
14	BARAMBAI	2.294	2.225	4.519	2.164	2.095	4.259	130	130	260	94,25
15	MARABAHAN	3.149	2.926	6.075	2.912	2.751	5.663	237	175	412	93,22
16	WANARAYA	2.138	1.947	4.085	1.945	1.774	3.719	193	173	366	91,04
17	JEJANGKIT	979	900	1.879	928	866	1.794	51	34	85	95,48
BARITO KUALA		45.725	43.217	88.942	41.316	39.201	80.517	4.409	4.016	8.425	90,53

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data rekapitulasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), terlihat bahwa program penerbitan KIA telah berjalan dengan cukup baik di sebagian besar wilayah. Persentase rata-rata kepemilikan KIA menunjukkan angka yang terus meningkat, menandakan adanya kesadaran masyarakat dan upaya aktif dari pemerintah daerah dalam mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.

Meskipun demikian, masih terdapat wilayah-wilayah dengan persentase kepemilikan KIA yang relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi masyarakat mengenai manfaat KIA, keterbatasan akses terhadap layanan kependudukan, serta belum optimalnya integrasi pelayanan antara sekolah, fasilitas kesehatan, dan dinas kependudukan.

Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong upaya percepatan pencetakan KIA melalui pendekatan inovatif seperti pelayanan jemput bola, integrasi layanan saat pendaftaran sekolah, serta edukasi langsung kepada masyarakat.

Sebagaimana disajikan pada tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 329.799 jiwa yang semestinya memiliki KIA sebanyak 88.942 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki KIA sebanyak 80.517 jiwa (90,53%).

D. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Di era digitalisasi yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem identitas yang cepat, aman, dan efisien menjadi semakin mendesak. Menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi terbaru dalam transformasi pelayanan publik.

IKD adalah bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat pintar. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses verifikasi identitas warga negara secara online tanpa harus membawa dokumen fisik, serta memperkuat sistem keamanan data penduduk secara nasional.

Pelaksanaan aktivasi IKD di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas. Dukungan aktif dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya transformasi ini. Oleh karena itu, upaya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terus dilakukan secara masif dan terstruktur, baik melalui kegiatan langsung maupun media digital. Berikut data yang sudah melakukan aktivasi IKD di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 5.4 Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Se- Kabupaten Barito Kuala

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKD	WAJIB KTP SUDAH REKAM	PROGRESS (%)
1	TABUNGANEN	792	15.323	5,17
2	TAMBAN	2.081	24.663	8,44
3	ANJIR PASAR	533	13.304	4,01
4	ANJIR MUARA	781	16.942	4,61
5	ALALAK	2.821	46.783	6,03
6	MANDASTANA	847	13.220	6,41
7	RANTAU BADAUH	448	12.616	3,55
8	BELAWANG	430	10.729	4,01
9	CERBON	384	7.607	5,05
10	BAKUMPAI	477	8.272	5,77
11	KURIPAN	278	4.555	6,10
12	TABUKAN	326	6.873	4,74
13	MEKARSARI	1.097	13.849	7,92
14	BARAMBAI	853	11.993	7,11
15	MARABAHAN	2.197	17.113	12,84
16	WANARAYA	1.043	11.187	9,32
17	JEJANGKIT	283	5.008	5,65
BARITO KUALA		15.671	240.037	6,53

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024, tercatat total 15.671 aktivasi dari 240.037 wajib KTP yang telah terekam. Angka ini menunjukkan progres pencatatan identitas digital yang mencapai 6,53% di tingkat kabupaten secara keseluruhan. Beberapa kecamatan dengan progres aktivasi IKD tertinggi meliputi Marabahan dengan 12,84%, Wanaraya dengan 9,32% dan Tamban dengan 8,44%. Sementara itu, kecamatan dengan progres aktivasi IKD yang lebih rendah antara lain Rantau Badauh dengan 3,55%, Anjir Pasar dengan 4,01%, dan Anjir Muara dengan 4,61%.

Pencapaian aktivasi IKD yang bervariasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat adopsi identitas digital di berbagai kecamatan. Kecamatan dengan progres

lebih tinggi mungkin memiliki infrastruktur yang lebih baik atau kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang pentingnya aktivasi IKD. Sebaliknya, kecamatan dengan progres rendah mungkin memerlukan perhatian lebih dalam hal penyuluhan, kemudahan akses, atau dukungan teknis.

Untuk mempercepat adopsi IKD di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam memperkenalkan manfaat IKD kepada masyarakat, serta memastikan bahwa proses aktivasi lebih mudah diakses oleh semua penduduk. Hal ini akan memperkuat sistem administrasi kependudukan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan publik berbasis digital.

E. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen legal untuk menunjukkan hubungan keperdataan seseorang dengan orang lainnya adapun jenis akta diantaranya :

1. Akta Kelahiran

Akta Pencatatan Sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara, yakni catatan sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti peristiwa Kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengesehan anak dan lain-lain.

Akta kelahiran terkait dengan kependataan orang tua. Jadi dokumen kependudukan seperti halnya akta juga wajib dimiliki oleh penduduk dalam kaitannya dengan hak kependataan tersebut ini.

Tabel 5.5 Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Usia

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGENEN	10.693	10.391	21.084	5.285	5.138	10.423	5.408	5.253	10.661	49,44
2	TAMBAN	16.856	16.285	33.141	8.036	7.726	15.762	8.820	8.559	17.379	47,56
3	ANJIR PASAR	9.030	8.904	17.934	4.598	4.449	9.047	4.432	4.455	8.887	50,45
4	ANJIR MUARA	11.876	11.541	23.417	5.624	5.324	10.948	6.252	6.217	12.469	46,75
5	ALALAK	33.127	32.482	65.609	16.481	15.886	32.367	16.646	16.596	33.242	49,33
6	MANDASTANA	9.317	9.118	18.435	4.743	4.579	9.322	4.574	4.539	9.113	50,57
7	RANTAU BADAUH	8.662	8.573	17.235	4.229	4.129	8.358	4.433	4.444	8.877	48,49
8	BELAWANG	7.381	7.105	14.486	3.490	3.169	6.659	3.891	3.936	7.827	45,97
9	CERBON	5.243	5.109	10.352	2.598	2.488	5.086	2.645	2.621	5.266	49,13
10	BAKUMPAI	5.853	5.432	11.285	2.823	2.525	5.348	3.030	2.907	5.937	47,39
11	KURIPAN	3.158	2.981	6.139	1.723	1.600	3.323	1.435	1.381	2.816	54,13
12	TABUKAN	4.863	4.763	9.626	2.622	2.570	5.192	2.241	2.193	4.434	53,94
13	MEKARSARI	9.581	9.285	18.866	5.307	5.026	10.333	4.274	4.259	8.533	54,77
14	BARAMBAI	8.343	8.172	16.515	4.393	4.279	8.672	3.950	3.893	7.843	52,51
15	MARABAHAN	11.587	11.628	23.215	6.325	6.337	12.662	5.262	5.291	10.553	54,54
16	WANARAYA	7.821	7.475	15.296	3.851	3.609	7.460	3.970	3.866	7.836	48,77
17	JEJANGKIT	3.537	3.353	6.890	1.687	1.575	3.262	1.850	1.778	3.628	47,34
BARITO KUALA		166.928	162.597	329.525	83.815	80.409	164.224	83.113	82.188	165.301	49,84

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran di seluruh usia di Kabupaten Barito Kuala, tercatat 49,84% dari total penduduk yang memiliki akta kelahiran, dengan perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Secara total, terdapat 329.525 individu yang wajib memiliki akta kelahiran, terdiri dari 166.928 laki-laki dan 162.597 perempuan. Dari jumlah tersebut, 164.224 orang telah memiliki akta kelahiran, sementara 165.301 orang lainnya masih belum memilikinya.

Beberapa kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Kuripan dengan 54,13%, Tabukan dengan 53,94%, Mekarsari dengan 54,77% dan Marabahan dengan 54,54%.

Kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terendah meliputi Belawang dengan 45,97%, Anjir Muara dengan 46,75% dan Tamban dengan 47,56%.

Secara umum, kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik atau akses yang lebih mudah ke layanan pembuatan akta kelahiran. Sebaliknya, kecamatan dengan persentase rendah mungkin menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi, aksesibilitas, atau adanya kendala administratif dalam pembuatan akta kelahiran.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya untuk memperbaiki distribusi layanan kepemilikan akta kelahiran ini, khususnya di kecamatan yang masih memiliki angka rendah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh warga memiliki identitas yang sah dan dapat memperoleh hak-haknya dengan baik.

Sedangkan cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Kepemilikan akta kelahiran usia 0-5 Tahun

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	801	752	1.553	717	675	1.392	84	77	161	89,63
2	TAMBAN	1.165	1.085	2.250	1.163	1.084	2.247	2	1	3	99,87
3	ANJIR PASAR	664	621	1.285	606	574	1.180	58	47	105	91,83
4	ANJIR MUARA	933	828	1.761	856	747	1.603	77	81	158	91,03
5	ALALAK	2.755	2.561	5.316	2.580	2.413	4.993	175	148	323	93,92
6	MANDASTANA	790	744	1.534	779	738	1.517	11	6	17	98,89
7	RANTAU BADAUH	690	648	1.338	657	616	1.273	33	32	65	95,14
8	BELAWANG	581	527	1.108	557	517	1.074	24	10	34	96,93
9	CERBON	348	397	745	348	397	745	0	0	0	100
10	BAKUMPAI	490	463	953	472	450	922	18	13	31	96,75
11	KURIPAN	260	236	496	260	236	496	0	0	0	100
12	TABUKAN	391	389	780	383	364	747	8	25	33	95,77
13	MEKARSARI	695	681	1.376	670	656	1.326	25	25	50	96,37
14	BARAMBAI	652	624	1.276	651	622	1.273	1	2	3	99,76
15	MARABAHAN	965	879	1.844	964	879	1.843	1	0	1	99,95
16	WANARAYA	662	536	1.198	659	534	1.193	3	2	5	99,58
17	JEJANGKIT	274	282	556	273	279	552	1	3	4	99,28
	BARITO KUALA	13.116	12.253	25.369	12.595	11.781	24.376	521	472	993	96,09

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Tabel 5.7 Kepemilikan Akta kelahiran usia 0 -18 tahun

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA			MEMILIKI			BELUM MEMILIKI			(%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	TABUNGANEN	3.024	2.864	5.888	2.836	2.682	5.518	188	182	370	93,72
2	TAMBAN	4.515	4.270	8.785	4.362	4.156	8.518	153	114	267	96,96
3	ANJIR PASAR	2.448	2.326	4.774	2.344	2.239	4.583	104	87	191	96,00
4	ANJIR MUARA	3.424	3.204	6.628	3.270	3.069	6.339	154	135	289	95,64
5	ALALAK	9.870	9.388	19.258	9.284	8.838	18.122	586	550	1.136	94,10
6	MANDASTANA	2.729	2.605	5.334	2.641	2.526	5.167	88	79	167	96,87
7	RANTAU BADAUH	2.425	2.333	4.758	2.344	2.245	4.589	81	88	169	96,45
8	BELAWANG	2.012	1.838	3.850	1.950	1.786	3.736	62	52	114	97,04
9	CERBON	1.442	1.378	2.820	1.397	1.338	2.735	45	40	85	96,99
10	BAKUMPAI	1.623	1.485	3.108	1.585	1.456	3.041	38	29	67	97,84
11	KURIPAN	856	792	1.648	851	782	1.633	5	10	15	99,09
12	TABUKAN	1.393	1.437	2.830	1.372	1.394	2.766	21	43	64	97,74
13	MEKARSARI	2.691	2.470	5.161	2.652	2.431	5.083	39	39	78	98,49
14	BARAMBAI	2.356	2.306	4.662	2.298	2.244	4.542	58	62	120	97,43
15	MARABAHAN	3.254	3.044	6.298	3.213	3.000	6.213	41	44	85	98,65
16	WANARAYA	2.211	2.026	4.237	2.169	1.998	4.167	42	28	70	98,35
17	JEJANGKIT	1.006	930	1.936	999	924	1.923	7	6	13	99,33
BARITO KUALA		47.279	44.696	91.975	45.567	43.108	88.675	1.712	1.588	3.300	96,41

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Barito Kuala, tercatat bahwa 96,41% dari jumlah anak yang wajib memiliki akta kelahiran sudah memilikinya. Dari total 91.975 anak yang wajib memiliki akta kelahiran (terdiri dari 47.279 laki-laki dan 44.696 perempuan), sebanyak 88.675 anak telah memiliki akta kelahiran, sementara 3.300 anak lainnya masih belum memiliki.

Beberapa kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Jejangkit dengan 99,33%, Kuripan dengan 99,09%, Mekarsari dengan 98,49%, Marabahan dengan 98,65%, dan Wanaraya dengan 98,35%.

Di sisi lain, kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran lebih rendah, meskipun tetap tinggi, adalah Alalak dengan 94,10%, dan Tabunganen dengan 93,72%.

Secara keseluruhan, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik dalam hal kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun, dengan persentase lebih dari 90% di hampir semua kecamatan. Namun, masih terdapat sejumlah kecil anak yang belum memiliki akta kelahiran, yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mencapai 100% kepemilikan akta kelahiran untuk seluruh anak di daerah ini.

Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak, terutama yang berada di kecamatan dengan angka kepemilikan lebih rendah, mendapatkan akta kelahiran mereka, guna menjamin hak mereka dalam administrasi kependudukan dan akses terhadap layanan publik.

2. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang merupakan identitas atas penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang sudah berlaku. Sebagai contoh kepemilikan akta kematian digunakan untuk pengesahan hak waris, urusan kepegawaian atau asuransi dan lain sebagainya.

Tabel 5.8 Jumlah Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024

NO	KECAMATAN	CETAK AKTA KEMATIAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TABUNGANEN	69	57	126
2	TAMBAN	100	67	167
3	ANJIR PASAR	59	57	116
4	ANJIR MUARA	124	98	222
5	ALALAK	241	142	383
6	MANDASTANA	79	60	139
7	RANTAU BADAUH	123	103	226
8	BELAWANG	42	47	89
9	CERBON	39	40	79
10	BAKUMPAI	41	29	70
11	KURIPAN	35	21	56
12	TABUKAN	28	12	40
13	MEKARSARI	56	50	106
14	BARAMBAI	56	41	97
15	MARABAHAN	86	55	141
16	WANARAYA	38	31	69
17	JEJANGKIT	35	27	62
KAB. BARITO KUALA		1.251	937	2.188

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa jumlah penerbitan akta kematian selama Tahun 2024 berjumlah 2.188 akta kmatian, Rendahnya angka penduduk yang memiliki akta kematian tidak berarti rendahnya masyarakat yang meninggal pada tahun tersebut, tapi lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat dan rasa enggan untuk melaporkan kejadian kematian kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

3. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel 5.6 menyajikan data penduduk Kabupaten Barito Kuala yang menikah pada tahun 2024 dan memiliki akta perkawinan :

Tabel 5.9 Kepemilikan Akta Perkawinan

No	KECAMATAN	WAJIB AKTA KAWIN	MEMILIKI AKTA KAWIN	BELUM MEMILIKI AKTA KAWIN	KEPEMILIKAN AKTA KAWIN (%)
1	TABUNGANEN	10.900	3.801	7.099	34,87
2	TAMBAN	16.521	9.823	6.698	59,46
3	ANJIR PASAR	8.666	5.026	3.640	58,00
4	ANJIR MUARA	11.308	6.948	4.360	61,44
5	ALALAK	31.431	19.718	11.713	62,73
6	MANDASTANA	9.173	5.801	3.372	63,24
7	RANTAU BADAUH	8.654	4.582	4.072	52,95
8	BELAWANG	7.152	4.340	2.812	60,68
9	CERBON	5.145	2.839	2.306	55,18
10	BAKUMPAI	5.584	3.307	2.277	59,22
11	KURIPAN	3.204	1.847	1.357	57,65
12	TABUKAN	4.779	2.591	2.188	54,22
13	MEKARSARI	9.126	5.827	3.299	63,85
14	BARAMBAI	8.144	5.324	2.820	65,37
15	MARABAHAN	11.325	7.583	3.742	66,96
16	WANARAYA	8.172	5.016	3.156	61,38
17	JEJANGKIT	3.398	1.889	1.509	55,59
BARITO KUALA		162.682	96.262	66.420	59,17

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Berdasarkan data kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Barito Kuala, tercatat bahwa dari 162.682 penduduk yang wajib memiliki akta kawin, baru 96.262 jiwa (atau sekitar 59,17%) yang telah memilikinya. Sementara itu, 66.420 jiwa (sekitar 40,83%) lainnya belum memiliki dokumen tersebut. capaian kepemilikan akta kawin di Kabupaten Barito Kuala masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Akta kawin merupakan dokumen penting sebagai bukti sah pernikahan yang memiliki implikasi hukum dan administrasi, seperti pencatatan kependudukan, pengurusan dokumen anak, hingga kepastian hukum dalam hak waris dan lainnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pelayanan keliling, dan integrasi program dengan instansi keagamaan atau pencatatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan akta kawin, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan persentase yang masih rendah.

4. Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki bagi pasangan yang sudah cerai hidup maupun pasangan yang sudah cerai mati. untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala Data kepemilikan akta perceraian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.10 Kepemilikan Akta Perceraian

NO	KECAMATAN	WAJIB AKTA CERAI	MEMILIKI AKTA CERAI	BELUM MEMILIKI AKTA CERAI	KEPEMILIKAN AKTA CERAI (%)
1	TABUNGANEN	291	44	247	15,12
2	TAMBAN	614	211	403	34,36
3	ANJIR PASAR	467	164	303	35,12
4	ANJIR MUARA	528	163	365	30,87
5	ALALAK	1.359	680	679	50,04
6	MANDASTANA	293	120	173	40,96
7	RANTAU BADAUH	342	117	225	34,21
8	BELAWANG	328	85	243	25,91
9	CERBON	237	105	132	44,30
10	BAKUMPAI	240	91	149	37,92
11	KURIPAN	100	29	71	29,00
12	TABUKAN	208	50	158	24,04
13	MEKARSARI	391	111	280	28,39
14	BARAMBAI	329	127	202	38,60
15	MARABAHAN	549	264	285	48,09
16	WANARAYA	246	72	174	29,27
17	JEJANGKIT	125	38	87	30,40
BARITO KUALA		6.647	2.471	4.176	37,17

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Tanggal 9 April 2025

Jika dilihat menurut wilayah, maka persentase penduduk berstatus cerai dan memiliki akta perceraian tertinggi berada pada Kecamatan alalak yaitu 50,04 persen, diikuti Kecamatan Marabahan 48,09 persen sedangkan yang terendah di Kecamatan Tabunganen yaitu 15,12 persen. Tingkat kepemilikan akta cerai yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang belum mengurus dokumen resmi perceraian mereka. Padahal, akta cerai sangat penting sebagai bukti hukum atas status pernikahan yang telah berakhir secara sah dan berimplikasi pada berbagai aspek hukum dan administrasi, termasuk hak asuh anak, hak waris, dan pembagian harta bersama.

Perlu adanya untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta cerai, melalui:

- Edukasi dan sosialisasi hukum keluarga,
- Fasilitasi layanan terpadu pengurusan akta cerai,
- Kolaborasi antara pengadilan agama dan dinas kependudukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka kepemilikan akta cerai di Kabupaten Barito Kuala dapat meningkat secara signifikan.

BAB VI

KESIMPULAN

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang professional.

Secara umum, Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek kependudukan, seperti peningkatan jumlah penduduk dan tingginya kepemilikan akta kelahiran pada usia 0–18 tahun. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal migrasi keluar yang lebih tinggi dibandingkan masuk, serta rendahnya tingkat aktivasi IKD dan kepemilikan akta perkawinan dan cerai. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Di sisi lain masih banyak potensi data kependudukan yang harus kami gali sehingga dapat dijadikan pijakan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, khususnya data pencatatan perkawinan dan pencatatan sipil, sehingga data Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi lebih baik.

Akurasi dan validasi data ini juga dipengaruhi oleh kesadaran Masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala , disamping peran aktif aparatur/petugas dan Masyarakat dalam melakukan peran stelsel aktif untuk pelayanan publik.

MACAM-MACAM INOVASI LAYANAN DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BARITO KUALA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi layanan. Inovasi-inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil maupun yang memiliki keterbatasan akses. Berikut beberapa inovasi unggulan yang diterapkan:

1. TARUMADOKBIT (Daftar di Rumah, Dokumen Terbit)

Inovasi ini mendorong digitalisasi pelayanan dengan menggunakan aplikasi berbasis Web Portal yang bisa di akses menggunakan internet melalui laman Web <http://tarumadokbit-dukcapil.baritokualakab.go.id/>

Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk **mengurus dokumen kependudukan dari rumah** tanpa perlu datang ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala. Pengajuan dilakukan secara daring (online). Setelah dokumen selesai diproses, masyarakat dapat langsung menerima dokumen tanpa harus antri.

2. PAKRS (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Sakit)

Melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Aziz Marabahan, Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala memberikan layanan bagi warga yang baru melahirkan berupa penerbitan **Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA)** melalui aplikasi **TARUMADOKBIT** dan untuk pembuatannya di bantu oleh pihak Rumah Sakit tanpa harus ke kantor Dinas Dukcapil.

3. PAKODE (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)

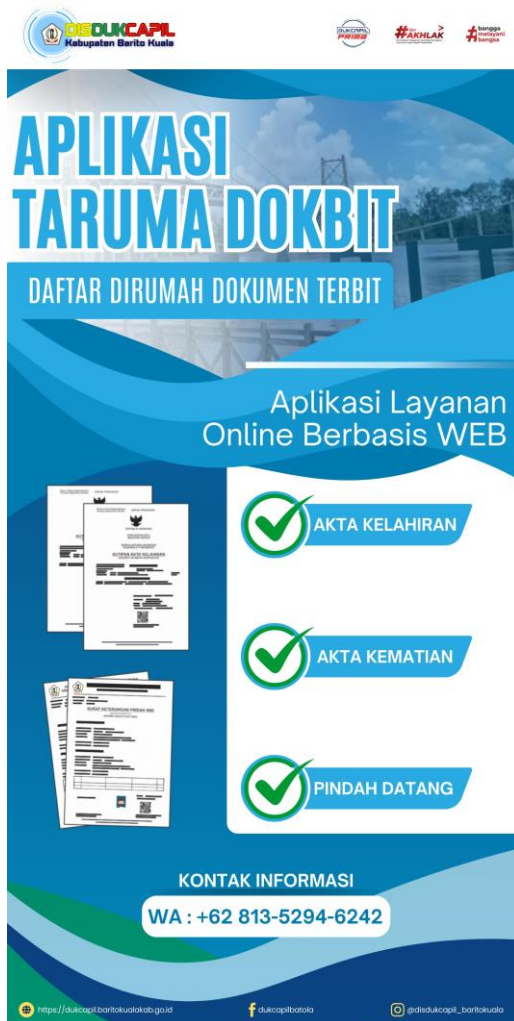
Untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat layanan, **Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala** bekerja sama dengan **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Barito Kuala** melalui aplikasi berbasis Web portal yang di beri nama **“Si Lisa” (Sisitem Informasi Layanan Pemerintah Desa)** dengan memanfaatkan para perangkat desa yang ada di seluruh Kabupaten Barito Kuala untuk membantu masyarakat mengurus pembuatan **Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga dan Pindah Datang**.

4. KANDA (Kami Datang Dokumen Tercetak)

KANDA adalah salah satu inovasi layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala dengan cara mengadakan jemput bola layanan keliling ke desa-desa. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti **perekaman e-KTP, perbaikan data, serta pencetakan dokumen**

kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung di desa. Inovasi ini bertujuan untuk pemerataan layanan dan peningkatan partisipasi warga dalam tertib administrasi.

5. Gambar Inovasi Layanan



DUKCAPIL
Kabupaten Barito Kuala

PAKODE

PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DESA

KERJASAMA DINAS DUKCAPIL KABUPATEN
BARITO KUALA DENGAN SELURUH PEMERINTAH
DESA LINGKUP KABUPATEN BARITO KUALA
MELALUI APLIKASI LAYANAN BERBASIS WEB

**si
LISA**

SISTEM INFORMASI LAYANAN
PEMERINTAH DESA



DUKCAPIL
PERKEMBANGAN

#AKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

<https://dukcapil.baritokualakab.go.id> [dukcapilbatola](#) [@disdukcapil_baritokuala](#)

DUKCAPIL
Kabupaten Barito Kuala

"KANDA"

KAMI DATANG DOKUMEN TERCETAK

PELAYANAN KELILING
JEMPUT BOLA KE
SELURUH DESA DAN
KECAMATAN
LINGKUP KABUPATEN
BARITO KUALA



MELAYANI

1. KARTU KELUARGA
2. KTP ELEKTRONIK
3. KARTU IDENTITAS ANAK
4. IKD
5. AKTA PENGACATAN SIPIL

<https://dukcapil.baritokualakab.go.id> [dukcapilbatola](#) [@disdukcapil_baritokuala](#)